

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

(Studi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ANISA NURMALITASARI

NIM. 145030107111054



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2018

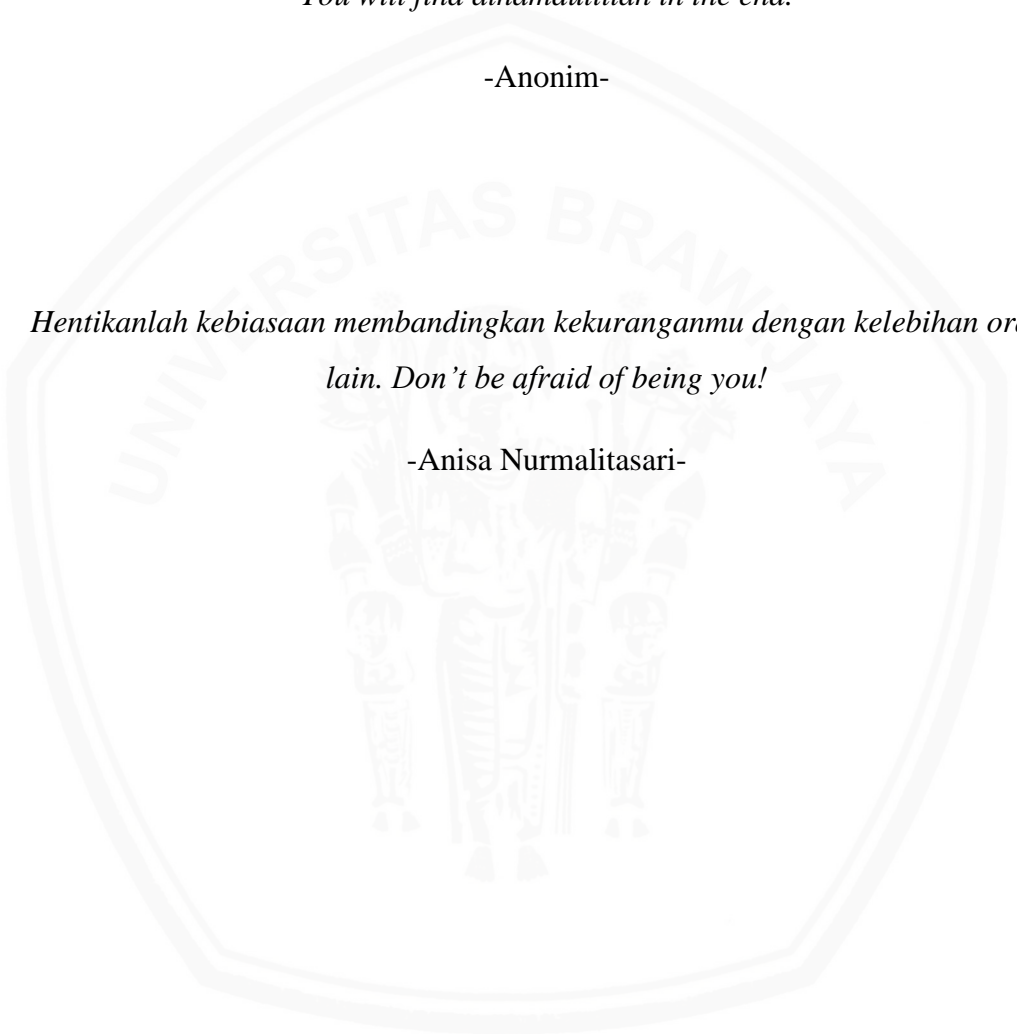
MOTTO

*Start everything with bismillah,
You will find alhamdulillah in the end.*

-Anonim-

*Hentikanlah kebiasaan membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang
lain. Don't be afraid of being you!*

-Anisa Nurmalitasari-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
(Studi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Magelang)

Disusun oleh : Anisa Nurmalitasari

NIM : 145030107111054

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 13 September 2018

Komisi Pembimbing,



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.
NIP. 19690524 200212 2 002

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 November 2018
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Anisa Nurmalitasari
Judul : Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
(Studi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS.
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS.
NIP. 19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

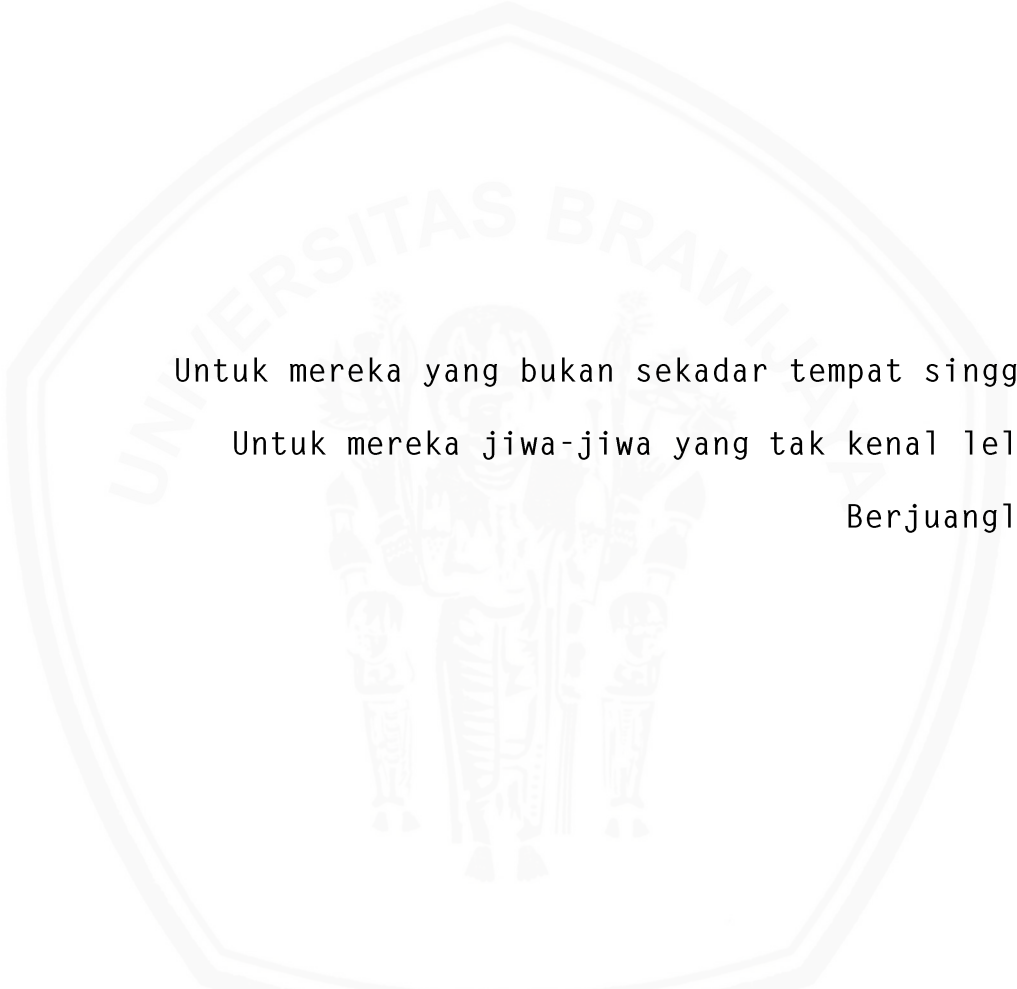
Malang, 13 September 2018

Mahasiswa,



Nama : Anisa Nurmalitasari

NIM : 145030107111054



Untuk mereka yang bukan sekadar tempat singgah,
Untuk mereka jiwa-jiwa yang tak kenal lelah.
Berjuanglah!

RINGKASAN

Anisa Nurmalitasari, 2018, **“Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Magelang)**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi menuntut pemerintah untuk melakukan respon terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang tidak tunggal, maka dari itu diperlukan suatu penanganan yang kompleks terhadap korban. Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah di Indonesia dengan kasus kekerasan perempuan dan anak yang cukup tinggi. Menanggapi masalah ini pemerintah daerah merespon dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan Permen PPPA Nomor 6 tahun 2015 dan Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2016. Sebagai sebuah program pemerintah, P2TP2A harus diimplementasikan untuk mengetahui apakah hasilnya efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program P2TP2A serta faktor yang mempengaruhi P2TP2A di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi oleh dua fokus yaitu: (1) efektivitas program P2TP2A di Kabupaten Magelang; (2) Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program P2TP2A di Kabupaten Magelang. Analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Miles Huberman dan Saldana dengan tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program P2TP2A di Kabupaten Magelang sudah cukup efektif. Hal ini ditentukan berdasarkan indikator-indikator efektivitas program yang berjalan sudah cukup baik yaitu dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Meski sudah terlaksana dengan baik, namun program ini masih memiliki beberapa kendala yang terjadi yaitu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dianggap belum mencukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai serta program yang kurang diketahui masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah penambahan jumlah dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai, sarana prasarana masih perlu dilengkapi serta meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan P2TP2A kepada masyarakat Kabupaten Magelang.

Kata Kunci: Perlindungan perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, efektivitas program, P2TP2A.

SUMMARY

Anisa Nurmalitasari, 2018, **“Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Magelang).** Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

The high rate of violence against women and children that occurs requires the government to respond by giving protection to women and children as the victims of violence. Violence against women and children can basically have a non-singular effect, so it is necessary to have a complex handling of victims. Magelang District is one of the regions in Indonesia with high cases of violence against women and children. Responding to this problem, the local government responded by forming an Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A) based on PPPA Regulation No. 6 of 2015 and Magelang District Regulation No. 2 of 2016. As a government program, P2TP2A must be implemented to find out whether the results are effective and in accordance with set goals. The purpose of this research is to describe and analyze the effectiveness of P2TP2A program and the factors that influence P2TP2A in Magelang District.

This research is descriptive research with qualitative approach. The limitation of this research is consist of two different focuses, namely: (1) the effectiveness of the P2TP2A program in Magelang District; (2) the supporting and inhibiting factors of the effectiveness of P2TP2A program in Magelang District. The analysis method that used is interactive model data analysis from Miles Huberman and Saldana with data collection stages, data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the effectiveness of the P2TP2A program in Magelang District is quite effective. This is determined based on the indicators of program effectiveness that are running well, measured by the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. Although it has been done well, this program still has some obstacles that occur, namely the amount and quality of human resources that are considered insufficient, inadequate facilities and infrastructure and programs that are not well known to the public. The recommendations resulted from this study are the addition of numbers and training to improve the quality of employees, infrastructure still needs to be completed and increase the socialization of the existence of P2TP2A to the people of Magelang Regency.

Keywords: Protection of women and children, violence against women and children, program effectiveness, P2TP2A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang).”** Skripsi ini adalah tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan skripsi tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepala dan seluruh pegawai Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang yang telah memberikan ijin, dukungan, serta sikap ramah dan terbuka selama penelitian.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Priyono, BA. dan Ibu Tri Setyowati, S.H. yang selalu setia memberikan dukungan dalam berbagai macam bentuk selama proses perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi.
7. Saudara-saudara kandung penulis, Rheza Ibrahim, S.Pt. dan Adhiza Atmaja, S.E. yang selalu ada disaat adik perempuan mereka satu-satunya ini membutuhkan bantuan dan dukungan.

8. Sahabat saya sejak SMP, Evita Lutvia Sari yang walaupun berjarak jauh tapi tetap bertahan menjadi tempat keluh kesah saya, mengerti apapun kondisi saya dan selalu suportif.
9. Sahabat seperantauan dari Magelang, Lailatul Anisah dan Nurul Fatimah yang telah mewarnai kehidupan perantauan pertama saya dan selalu siap sedia saat saya membutuhkan bantuan.
10. Sahabat Kuzenisme (Anggita Wulan Sari, Intan Yulianti, Tisha Windianty Kusuma Putri) yang telah mampu bertahan sejak maba dengan pasang surutnya tetap menjadi yang paling mengerti dan bisa diandalkan.
11. Pengurus Ha-Ryan Humanistik 2017, (Dianti Puspa, Bella Savitri, Hafshah Caca, Khetimareta, Rekha Kurnia, Ayudia Lestari, Riski Alvina, Ryan Dwi, Alfathansyah, Osvaldo Sativa, Abdul Aziz) yang awalnya sebatas teman organisasi namun kini menjadi keluarga yang selalu disisi.
12. Partner Dagri EM UB 2015 (Nadia, Danar, kak Zia, Dwi, Riza, Raki) yang tetap bertahan menjaga tali silaturahmi walaupun sudah tidak seorganisasi.
13. Adik-adikku di SKRT Humanistik 2017 (Rizki, Revi, Della, Marta, Veren, Yudhan, Jadon, Deva, Bhakty) bawel, receh, banyak nuntut tapi kurindu.
14. Anak-anak Satpam Komplek HEO, IKABRAMA, PM Humanistik 2016, Advokesma BEM FIA 2014, teman-teman publik angkatan 2014, dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu-satu yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	15
B. Pelayanan Publik.....	17
1. Definisi Pelayanan Publik	17
2. Asas-Asas Pelayanan Publik	20
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik	21
C. Otonomi Daerah	24
D. Efektivitas	25

1. Definisi Efektivitas	25
2. Ukuran Efektivitas	27
E. Program	30
1. Definisi Program	30
2. Ciri-ciri Terlaksananya Program	30
F. Kekerasan Perempuan dan Anak	31
1. Kekerasan Perempuan	31
2. Kekerasan Anak	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	47
G. Analisis Data	48
H. Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang	53
2. Gambaran Umum Dinas Sosial PPKB PPPA	64
3. Gambaran Umum P2TP2A	71
B. Penyajian Data	77
1. Efektivitas Program P2TP2A Kabupaten Magelang	77
a. Ketepatan Sasaran Program	77
b. Sosialisasi Program	80
c. Tujuan Program	86
d. Pemantauan Program	88

2. Faktor Pendukung dan Penghambat P2TP2A.....	93
a. Faktor Pendukung.....	93
b. Faktor Penghambat.....	96
C. Analisis Data.....	102
1. Efektivitas Program P2TP2A Kabupaten Magelang	102
a. Ketepatan Sasaran Program	102
b. Sosialisasi Program	103
c. Tujuan Program.....	105
d. Pemantauan Program.....	107
2. Faktor Pendukung dan Penghambat P2TP2A.....	109
a. Faktor Pendukung.....	109
b. Faktor Penghambat.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia 2011-2016.....	5
Tabel 2.	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kab. Magelang	8
Tabel 3.	Rekap Laporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011-2016.....	2
Gambar 2.	Analisis Data Model Interaktif	51
Gambar 3.	Peta Wilayah Kabupaten Magelang	59
Gambar 4.	Struktur Organisasi Dinas Sosial PPKB PPPA	70
Gambar 5.	Brosur P2TP2A	81
Gambar 6.	Poster P2TP2A	82
Gambar 7.	Sosialisasi P2TP2A di Balai Kecamatan	83
Gambar 8.	Baliho P2TP2A.....	84
Gambar 9.	Sekretariat P2TP2A	94
Gambar 10.	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)	95

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

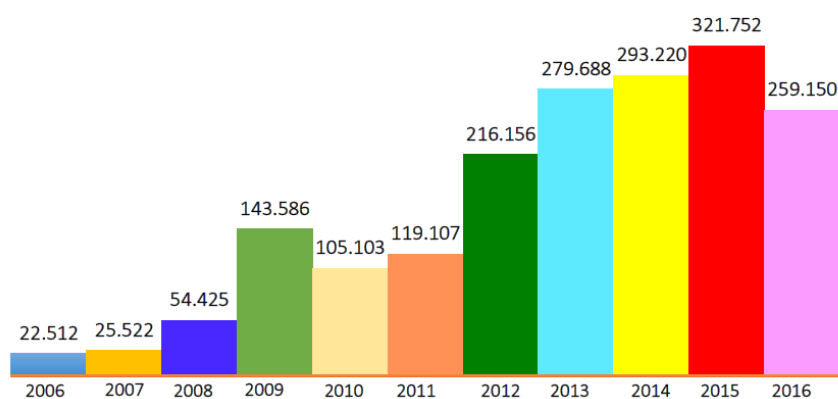
A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia disingkat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, sebagai pemberian Tuhan karena kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, masyarakat, maupun negara karena bukan manusia yang memberikan hak asasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia tersebut, maka artinya hak asasi manusia berlaku *universal* (menyeluruh). Bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai hak asasi yang sama ketika dilahirkan. Hal ini juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi internasional terbesar dan mencakup hampir semua negara di dunia. HAM mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia karena telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang, ternyata dalam penerapannya masih banyak ditemukan kasus pelanggaran HAM. Fenomena kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan dan anak merupakan suatu pelanggaran yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tidak ada tindak kekerasan terlebih yang telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.



Gambar 1. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2006-2016

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2017:10

Grafik diatas telah membuktikan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun selalu mengalami lonjakan kasus, kecuali pada tahun 2010 dan 2016. Meskipun pada tahun 2010 dan 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan sudah mulai berkurang, namun angka tersebut masih memprihatinkan. Fakta keprihatinan lain juga muncul karena apa yang tercantum

dalam data pada dasarnya masih belum mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Komnas perempuan menjelaskan bahwa fenomena gunung es memang terjadi pada masalah ini karena masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, pun untuk mendatangi lembaga terkait untuk meminta pertolongan. Banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan dan memendam kejadian yang dialami, diantaranya adalah stigma yang berkembang di masyarakat dimana perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam kekerasan serta kurangnya pemahaman korban akan keberadaan lembaga pelayanan yang bisa memberikan perlindungan kepada korban. (Komnas Perempuan, 2017:10).

Posisi rentan perempuan yang diakibatkan oleh budaya patriarki yang masih dipegang erat dalam kehidupan masyarakat merupakan akar dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Fadlurrahman (2014:162), memaparkan bahwa pada konteks kekerasan, budaya patriarki secara langsung maupun tidak langsung telah menciptakan relasi kuasa yang timpang (ketidaksetaraan) antara laki-laki dan perempuan. Relasi ini telah memposisikan laki-laki berada di tempat *superior* sedangkan perempuan berada di tempat *inferior* (sub ordinasi). Berawal dari anggapan yang diyakini bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi inilah kemudian memunculkan stigma bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih dalam mengontrol perempuan, dimana kontrol yang dimaksud juga termasuk kontrol dengan cara kekerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa anggapan lemahnya kedudukan perempuan seperti yang dijelaskan diatas telah menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Berangkat dari fakta tersebut pula tidak mengherankan jika kini lingkup kekerasan perempuan telah meluas pada seluruh ranah kehidupan baik ranah publik maupun privat. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa secara keseluruhan kekerasan dalam bentuk privat berupa kekerasan personal merupakan permasalahan yang paling dominan terjadi yaitu sebesar 69% dari total keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi dalam ranah ini. Kekerasan tersebut terbagi menjadi 60% kasus kekerasan terhadap istri, 24% kasus kekerasan dalam pacaran, 8% kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan sisanya adalah kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, kekerasan pada pekerja rumah tangga dan lain-lain. Data-data tersebut membuktikan bahwa keluarga dan orang terdekat justru kini sudah bukan tempat yang aman bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2017:21).

Selain perempuan, anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan apapun keinginan orang tua. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan.

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia	
2011	2178
2012	3512
2013	4311
2014	5066
2015	4039
2016	4620

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia tahun 2011-2016

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (www.kpai.go.id).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan anak di Indonesia secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun sempat menurun pada tahun 2015. Lonjakan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2012 yakni terdapat peningkatan sebanyak 1334 kasus. Puncak tertinggi kasus kekerasan pada anak terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai 5066 kasus. Namun hal ini dibarengi dengan harapan baru dengan turunnya kasus menjadi 4039 di tahun 2015.

Secara umum, kekerasan terhadap anak terkait dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dari faktor kultural, misalnya adanya pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Apabila anak dinilai rewel, lalai, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, anak akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kebanyakan dapat berubah menjadi kekerasan. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga

maupun masyarakat. Di sini anak berada pada posisi lebih lemah, lebih rendah secara fisik karena pada kenyataannya memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak.

Kekerasan anak adalah suatu isu yang harus ditanggapi serius karena memberikan dampak, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek atau dampak langsung dapat berupa patah tulang, luka bakar, luka terbuka, pertumbuhan fisik yang kurang dari anak sebayanya, gangguan kejiwaan, kerusakan menetap pada susunan syaraf pusat hingga kematian. Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah munculnya perasaan bersalah, malu, menyalahkan diri sendiri; gangguan perasaan seperti cemas atau depresi; kehilangan minat untuk bersekolah seperti sering melamun atau tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau membolos, tidak peduli terhadap hasil dengan atau tujuan; stress pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, merasa gelisah dan cemas menghadapi lingkungan yang agak berubah; dan masalah terhadap diri sendiri, seperti melakukan isolasi terhadap diri sendiri, rasa dendam dan takut terhadap sikap ramah/kehangatan/kemesraan dari orang lain. Secara akumulasi maka kekerasan yang dialami anak akan membentuk diri anak sebagai individu yang tidak berwatak dan berkemampuan mengasuh, merawat, dan mendidik dengan cara-cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Anak ketika dewasa menjadi pribadi yang suka melakukan kekerasan kepada orang lain termasuk

kepada anak-anaknya sendiri (P2TP2A dalam Afrilia, 2011:11). Sudah seharusnya kekerasan anak mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, mengingat anak adalah aset bangsa, generasi penerus bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tentu menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut penting untuk dilakukan tidak lepas dari sifat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kompleks dan dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sudah terlihat dalam Peraturan Perundang-Undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka pemerintah dan segenap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi. Korban dapat lebih memperjuangkan hak-haknya karena telah ada jaminan hukum.

Diterapkannya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan menimbulkan adanya tuntutan keterlibatan beberapa pihak yang berperan dalam mengimplementasikannya, salah satunya adalah pemerintah daerah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 13 UU PDKRT yang menjelaskan mengenai tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah sebagai penyelenggaraan pelayanan korban yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti

penyediaan ruang pelayanan khusus, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses korban serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga korban. Pelibatan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan pada dasarnya dapat dinilai sebagai hal yang sangat relevan untuk dilakukan karena sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi yang mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah di Indonesia yang telah menunjukkan perhatian serius dalam menanggapi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perhatian yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kekerasan yang terjadi di daerahnya.

Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magelang	
2011	100
2012	140
2013	120
2014	82
2015	98
2016	113

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016

Berdasarkan pada data kekerasan diatas, dapat dipahami bahwa kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Magelang memang menunjukkan angka yang tidak konsisten. Namun apabila dilihat dari kecenderungannya angka tersebut cenderung meningkat walaupun sempat mengalami penurunan. Terlepas dari data yang ada, perlu dipahami kembali bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana apa yang terekam dalam data tidak bisa menggambarkan kenyataan sebenarnya mengenai kekerasan yang terjadi di masyarakat. Dari pendapat tersebut maka masih terdapat kemungkinan bahwa jumlah kekerasan di Kabupaten Magelang sebenarnya lebih dari apa yang terekam dalam data.

Melihat kenyataan yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Magelang merespon fenomena ini dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi. Berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan. Program ini bertujuan untuk mencegah kekerasan,

melindungi korban, menindak pelaku, memberikan rasa aman bagi korban serta memulihkan kondisi fisik, psikis, maupun ekonomi korban. P2TP2A ini merupakan program perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak di bawah naungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Adanya program P2TP2A ini dan sejumlah fakta empiris yang muncul seperti masih tingginya jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya daerah Kabupaten Magelang yang telah dipaparkan sebelumnya, membuat peneliti ingin mengkaji bagaimana keefektifitasan program ini dalam menanggulangi dan melindungi korban kekerasan. Keban dalam Pasolong (2007:4), mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Demikian pula dengan program, dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai ukuran-ukuran efektivitas. Menurut Budiani (2007:53), untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut, diantaranya adalah ketepatan sasaran program; sosialisasi program; tujuan program; pemantauan program.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini dengan penelitian berjudul “Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengangkat rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun melalui penelitian ini dapat diperoleh kontribusi penelitian sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga dapat

digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi yang berguna bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang terkait keefektifan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi yang ada dalam penelitian ini karena berisi uraian singkat atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir mengenai efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terbagi menjadi beberapa sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian mengenai alasan mendasar peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program P2TP2A di Kabupaten Magelang. Dalam bab pendahuluan ini juga dipaparkan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan berbagai teori yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung dan menganalisa atau menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB III : METODE PENELITIAN

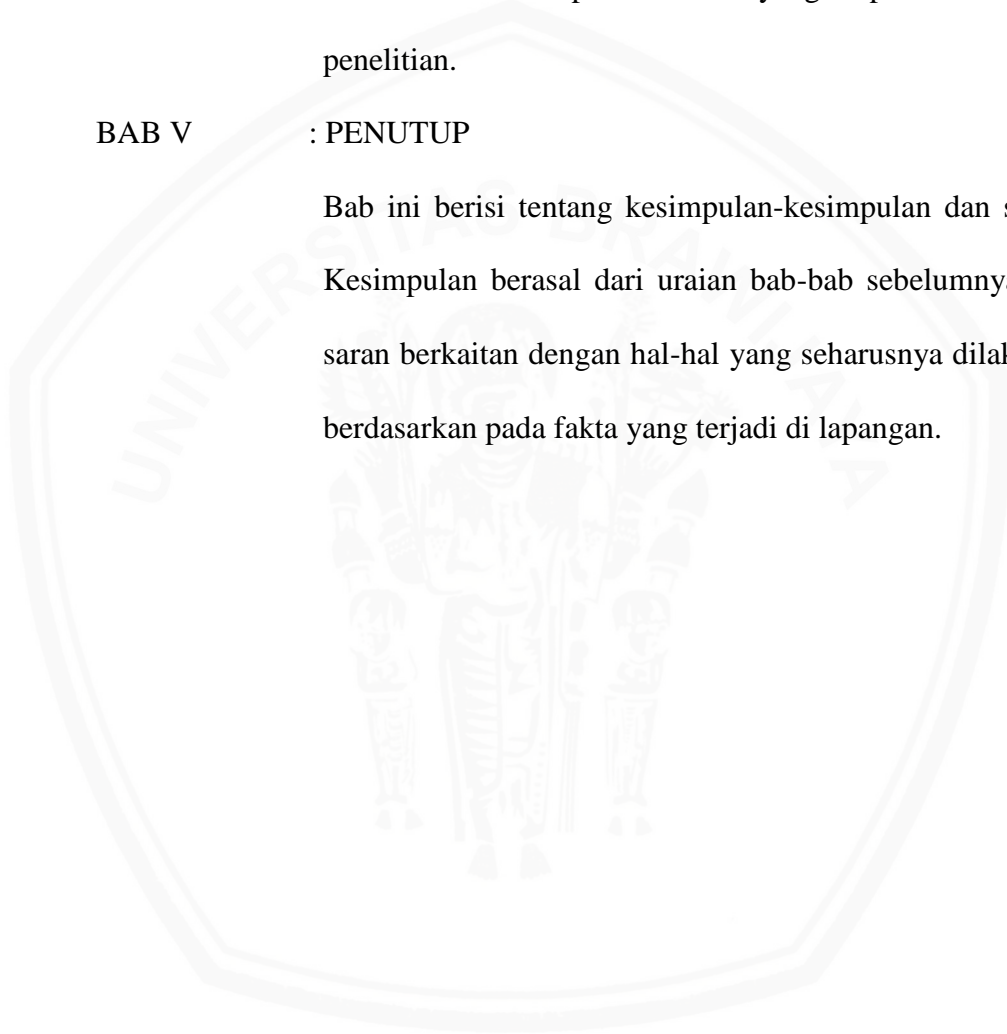
Bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu bab ini juga membahas mengenai fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data penelitian, dan hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Indradi (2006:113), administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu menurut Wilson dalam Tjiptoherijanto (2010:111), administrasi publik adalah proses operasionalisasi keputusan politik, dengan demikian memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah administrasi.

Tjokroamidjojo dalam Tjiptoherijanto (2010:112), menjelaskan mengenai tiga fungsi utama administrasi publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi kebijakan: memiliki empat subfungsi, yakni fungsi analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, menyusun program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu atau generasi, antar sektor dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintahan;
- b. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi: yang perlu dikelola adalah organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik;
- c. Penggunaan dinamika administrasi: meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan atau pengendalian unsur-

- d. unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik.

Administrasi publik menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:24), adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Berdasarkan pendapat Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2006:23), administrasi publik meliputi:

“Implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, dan secara global administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.”

Sedangkan definisi administrasi publik menurut Nigro dalam Syafiie (2006:24) mencakup:

1. Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka;
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori ini karena

sesuai dengan topik yang diteliti yaitu P2TP2A. P2TP2A merupakan perwujudan dari proses kerjasama sekelompok orang atau lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan berbentuk program yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

B. Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Dalam bab I Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan, bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal diatas menempatkan kebutuhan akan layanan dari warga negara. Sedangkan menurut Sinambela, dkk (2008:5) mengemukakan bahwa pelayanan publik diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik oleh Moenir (2015:26) diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Handayaniingrat dalam Suwondo (2001:29) membedakan antara pelayanan masyarakat yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Sedangkan pelayanan umum

(public service) yaitu pelayanan yang diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan dengan melayani kepentingan umum dibidang produksi atau distribusi yang bergerak dibidang produksi atau distribusi yang bergerak dibidang jasa-jasa vital.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 58 tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

- a. Pelayanan administratif;
- b. Pelayanan barang;
- c. Pelayanan jasa;

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan keterangan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pelayanan sertifikat tanah, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akte kelahiran, dan akte kematian), semuanya memerlukan pelayanan yang optimal.

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyalurnya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut

menghasilkan produk akhir berwujud benda, atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunaannya. Misalnya, jenis-jenis pelayanan pembayaran iuran listrik, air minum dan telepon.

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos, pelayanan pemadam kebakaran, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Rewansyah (2011:58) bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan Pemerintahan, yaitu pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, paspor dan identitas kependudukan lainnya.
2. Pelayanan Pembangunan, yaitu jenis pelayanan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi: penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit dan sebagainya.
3. Pelayanan Utilitas, yaitu jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti: penyediaan listrik, air bersih, telepon dan transportasi masal.
4. Pelayanan Sandang, Pangan dan Papan, yaitu jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti: beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan sederhana atau murah.
5. Pelayanan Kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan yang lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah jompo dan yatim piatu dan sebagainya.

Rewansyah (2011:59) juga berpendapat bahwa jika ditinjau dari penyedia (*provider*) atau subjek pelayanan, pelayanan publik terdiri dari empat jenis pelayanan, yaitu:

“(1) *Government to Government* (Layanan dari instansi pemerintah ke instansi pemerintah lainnya). Misalnya: pelayanan administrasi kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Badan/Biro Kepegawaian Kementerian/LPNK/Pemda; Layanan konsultasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur oleh Lembaga Administrasi Negara kepada Badan Diklat Pegawai Kementerian/LPNK/Pemda); (2) *Government to People* (Layanan dari instansi pemerintah kepada warga masyarakat); (3) *Company to People* (Layanan dari dunia usaha ke warga masyarakat); (4) *People to People* (Layanan dari warga yang satu kepada warga masyarakat yang lain).”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh masyarakatnya baik dalam pemenuhan atau penyediaan barang dan jasa. Sesuai dengan pernyataan tersebut, P2TP2A dalam hal ini memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

2. Asas-Asas Pelayanan Publik

Hakekat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 sebagaimana dikutip dalam (Sjamsuddin, 2012:199) adapun asas-asas pelayanan publik adalah:

1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.

2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu pemberian layanan yang tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.
5. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dalam memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum dinyatakan bahwa ada sepuluh prinsip dalam layanan umum, yaitu:

1. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.
4. Akurasi: Produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan: Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas.
10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur dan disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Menurut pendapat Moenir (2015:41-44), pelayanan publik secara umum yang didambakan adalah:

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang terkadang dibuat-buat. Beberapa hambatan yang sering muncul sangat menjengkelkan karena terkadang terlihat ada unsur kesengajaan.
- b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutuan, sindiran atau kata lain semacamnya yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik untuk alasan dinas atau untuk kesejahteraan.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang. Apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang-orang tidak akan menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Pelayanan publik akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor antara lain: kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana, adanya aturan yang memadai, organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis, pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, dan tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas atau pekerjaan pelayanan (Moenir, 2015:123-124).

Menurut Moenir (2015:197) agar layanan dapat memuaskan orang atau kelompok yang dilayani, maka pelaku dalam hal ini petugas, harus memenuhi empat kriteria, antara lain: tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramahtamahan.

C. Otonomi Daerah

Tujuan pembentukan dari pemerintah daerah dapat dikaitkan dengan pengoptimalan pelaksanaan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah merupakan pemerintah yang dekat jangkauannya dengan masyarakat di lingkup terkecil dalam suatu negara. Pengertian pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sesuai dengan pengertian tersebut pemerintah daerah diberi suatu kewenangan untuk mengatur dan mengolah sendiri urusan daerahnya yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah kepada

pemerintah daerah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

“Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Adanya pemberian otonomi daerah tersebut diharapkan nantinya pemerintah daerah mampu mengelola daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki sehingga dengan begitu mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal tersebut. Terkait dengan hal itu, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya program P2TP2A, juga dapat lebih efektif karena bersentuhan langsung dengan masyarakat daerahnya sendiri.

D. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti berdaya guna. Etziomi dikutip oleh Steers (1985:10) berpendapat:

Suatu organisasi dapat dibentuk agar menjadi unit sosial yang paling efektif dan efisien, dimana efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Sedangkan efisiensi organisasi dikaji dari segi sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu unit pengeluaran (*output*). Selain itu, efektivitas organisasi dijabarkan berdasarkan keputusan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga dengan sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.

Menurut Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sedangkan menurut James L. Gibson dkk dalam Pasolong (2007:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Keban dalam Pasolong (2007:4), mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Miller dikutip oleh Tangkilisan (2005:138), mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih menekankan pada tujuan. Organisasi dapat dikatakan telah berhasil mencapai efektivitas apabila organisasi

tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian dengan program, dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai ukuran-ukuran efektivitas.

2. Ukuran Efektivitas

Indikator dari efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Duncan yang dikutip Steers (1985:53), dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan
Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit;
- b. Integrasi
Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi;
- c. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Budiani (2007:53), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program
Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya;

- b. Sosialisasi program
Sosialisasi kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya;
- c. Tujuan program
Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. Pemantauan program
Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Setiap organisasi yang ingin maju harus melibatkan anggota dalam rangka peningkatan mutu kerja.

Intinya adalah bagaimana terjadi kesesuaian antara rencana awal yang telah dirumuskan dengan dampak *output*. Dikatakan efektif apabila usaha yang dilakukan menimbulkan dampak bagi sasaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan dikatakan tidak efektif jika usaha yang dilakukan tidak menimbulkan atau tidak mengenai sasaran yang sudah ditetapkan.

Indikator penilaian efektivitas kerja, meliputi:

- 1. Etos kerja
Menurut Geertz dikutip oleh Kumorotomo (2005:23-25), etos diartikan sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos disebut juga sebagai kemungkinan-kemungkinan yang menjadi sumber motivasi seseorang dalam berbuat dan merupakan landasan ide, cita, atau pikiran yang akan menentukan sistem tindakan. Apabila dikaitkan dengan situasi kehidupan manusia maka etos kerja yang tinggi akan menjadi syarat mutlak yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan itu. Hal tersebut akan membuka pandangan dan sikap kepada manusianya untuk menilai tinggi kerja keras dan sungguh-sungguh sehingga dapat mengikis sikap kerja yang asal-asalan karena untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2. Disiplin kerja
Kata “disiplin” berasal dari bahasa Latin “*diciplina*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Menurut Nitisemito (1996:118), disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Kedisiplinan

kerja merupakan masalah yang perlu diperhatikan, sebab dengan adanya kedisiplinan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Dilihat dari sisi manajemen, terjadinya disiplin kerja akan melibatkan dua kegiatan pendisiplinan yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong disiplin diri diantara para karyawan agar mengikuti berbagai standar atau aturan sehingga penyelewengan kerja dapat dicegah;
- b. Korektif, kegiatan ini ditujukan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.

Tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai apabila kegiatannya berjalan secara efektif dan didukung oleh faktor-faktor pendukungnya, menurut Steers (1985:209-211), yaitu sebagai berikut:

1. Ciri organisasi
Dapat dilihat dari struktur dan teknologi organisasi. Apabila dilihat dari strukturnya, peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formasi. Sedangkan dari teknologi, jika struktur dan teknologi tersebut digabungkan, maka pegawai akan menghadapi masalah dengan mudah sehingga usaha untuk mencapai tujuan pun dapat diwujudkan;
2. Lingkungan
Keberhasilan hubungan organisasi dan lingkungan bergantung pada tiga hal, yaitu keadaan lingkungan, ketetapan persepsi, dan tingkat rasionalitas. Ketiga faktor tersebut berpengaruh kepada perubahan lingkungan;
3. Pekerja dan pegawai
Kesadaran akan perbedaan sifat pegawai sangat penting karena pegawai yang berbeda bisa menjadikan organisasi dapat menyesuaikan kemampuan dan kepribadian para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan pemaparan beberapa indikator efektivitas diatas, peneliti memilih menggunakan teori menurut Budiani karena lebih langsung terfokus pada efektivitas program sesuai dengan topik yang peneliti angkat yaitu efektivitas program P2TP2A. Indikator-indikator efektivitas program yang

terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program ini digunakan peneliti sebagai alat analisa data untuk data yang peneliti dapatkan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah program P2TP2A ini berjalan efektif atau sebaliknya.

E. Program

1. Definisi Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:1104), program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Menurut Kayatomo (1985:162), program merupakan rangkaian aktivitas yang mempunyai suatu permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan. Wenstra, dkk (1989:236), mendefinisikan program merupakan rumusan yang memuat gambaran yang akan dilaksanakan beserta petunjuk pelaksanaannya. Dari penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa program adalah sebuah rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu.

2. Ciri-ciri Terlaksananya Program

Mengutip dari *United Nations* dalam Zauhar (1993:2), bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan jelas;
2. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program secara selektif;
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan hasil dari program tersebut;
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
6. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Apabila keenam ciri tersebut dimiliki oleh sebuah program, maka dapat dikatakan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

F. Kekerasan Perempuan dan Anak

1. Kekerasan Perempuan

Secara konvensional kekerasan adalah suatu keadaan apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dibawah realisasi potensial. Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan, realitas jasmani dan mental psikologi daya aktualisasinya tidak mampu merespon lingkungan, dengan begitu maka aktualisasi dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwanya tertekan (Windhu dalam Sulaeman dan Homzah, 2010:28). Sementara itu masih dalam buku Sulaeman dan Homzah juga mengutip makna kekerasan dari kamus webster yang mengartikan kekerasan sebagai

penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa, dapat berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosi termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut (Sulaeman dan Homzah, 2010:51).

Suatu kekerasan pada dasarnya dapat menimpa siapapun tanpa memandang jenis kelamin, namun dengan adanya fenomena ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan (Sulaeman dan Homzah, 2010:1). Definisi lain kekerasan terhadap perempuan juga muncul dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikutip oleh Sulaeman dan Homzah (2010:78), istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) diartikan sebagai:

“Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”

Lebih lanjut dalam pasal 2 juga dijelaskan lagi mengenai makna kekerasan terhadap perempuan ini yang menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tapi tidak hanya sebatas pada: tindakan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan

eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, ancaman seksual ditempat kerja, dan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya”.

Sementara itu menurut Subhan hampir sejalan dengan definisi kekerasan dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam bukunya juga berusaha mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Disini tindakan kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai hal yang dapat mengakibatkan kerugian maupun penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya. Penderitaan ini dapat diwujudkan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan ini juga termasuk diantaranya adalah ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dimana kekerasan ini dapat terjadi di dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, maupun negara (Subhan, 2004:6).

Di Indonesia, pada awalnya menyebutkan kekerasan terhadap perempuan tidak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, kekerasan terhadap perempuan tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifik pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta berdampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perlakuan kekerasan yang menimpanya itu. Namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan tuntutan masyarakat saat ini kebijakan lebih responsif dan akomodatif terhadap

perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang ditujukan pada perempuan sebagai korbannya (Sulaeman dan Homzah, 2010:78). Walaupun secara eksplisit tidak ada satu pasal khusus yang mengatur kejahatan dengan nama “kejahatan terhadap perempuan”, tetapi dengan munculnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, maka setidaknya negara melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dalam melakukan apa yang sepatutnya dilakukan (Sulaeman dan Homzah, 2010:78). Dalam UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan ini setidaknya disebutkan beberapa bentuk kekerasan diantaranya:

1. Pasal 6: Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Pasal 7: Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
3. Pasal 8: Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu lainnya.
4. Pasal 9: Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena persetujuan atau perjanjian pihak laki-laki bahwa ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan pada serangkaian penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang mampu menyebabkan kesengsaraan yang dilakukan dengan alasan jenis kelamin yang dapat berwujud fisik, psikis, maupun seksual. Pada penelitian ini konsep kekerasan yang digunakan adalah konsep yang dimuat dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak

Kekerasan dan Diskriminasi. Dimana pada perda ini kekerasan dimaknai sebagai, “setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan sebagai “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi”. Kekerasan fisik diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

2. Kekerasan Anak

Berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan anak merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan,

melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual (Barker dalam Huraerah, 2007:47).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Menurut WHO (Tim Penulis P2TP2A dalam Afrilia, 2011:9), ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu:

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensial menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa:
 - a. Dipukuli/ ditempeleng;
 - b. Ditendang;
 - c. Dijewer, dicubit;
 - d. Dilempar dengan benda-benda keras;
 - e. Dijemur dibawah terik sinar matahari.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual ini dapat juga berupa:
 - a. Perlakuan tidak senonoh dari orang lain;
 - b. Kegiatan yang menjurus pada pornografi;
 - c. Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak;

- d. Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab;
 - e. Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi
3. Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:
- a. Kata-kata yang mengancam;
 - b. Menakut-nakuti;
 - c. Berkata-kata kasar;
 - d. Mengolok-olok anak;
 - e. Perlakuan diskriminatif dari orangtua, keluarga, pendidik, dan masyarakat;
 - f. Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungannya.
4. Tindakan pengabaian atau penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti:
- a. Pengabaian pada kesehatan anak;
 - b. Pengabaian pada pendidikan anak;
 - c. Pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekang);
 - d. Penelantaran pada pemenuhan gizi;
 - e. Penelantaran dan pengabaian pada penyediaan perumahan;

- f. Pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
- 5. Kekerasan ekonomi adalah penggunaan anak untuk tenaga kerja atau untuk kegiatan lainnya demi keuntungan orang dewasa (orang tuanya, keluarganya, atau orang lain), seperti :
 - a. Menyuruh anak bekerja secara berlebihan;
 - b. Menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

Kekerasan yang dialami oleh seorang anak pada umumnya akan menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut (Tim Penulis P2TP2A dalam Afrilia, 2011:11) :

- 1. Dampak langsung :
 - a. Kematian;
 - b. Patah tulang;
 - c. Luka bakar;
 - d. Luka terbuka.
 - e. Kerusakan menetap pada susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar, kesulitan belajar, buta, tuli, gangguan motorik kasar dan halus, kejang, atalesia ataupun *hidrocefalus*;
 - f. Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak sebayanya;
 - g. Perkembangan kejiwaan, mengalami gangguan seperti gangguan kecerdasan, gangguan emosi, konsep diri (citra diri) buruk, bersikap agresif, memiliki hubungan sosial yang buruk.

2. Dampak jangka panjang:

- a. Muncul perasaan bersalah, malu, menyalahkan diri sendiri;
- b. Gangguan perasaan, seperti cemas atau depresi;
- c. Kehilangan minat untuk bersekolah seperti melamun atau tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau membolos, tidak peduli terhadap hasil ulangan atau ujian;
- d. Stress pasca trauma seperti terus menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, merasa gelisah dan cemas menghadapi lingkungan yang agak berubah;
- e. Masalah pada diri sendiri, seperti melakukan isolasi terhadap diri sendiri, rasa dendam dan takut terhadap sikap ramah/kehangatan/kemesraan dari orang lain.

Secara akumulasi maka kekerasan yang dialami anak akan membentuk diri anak sebagai individu yang tidak berwatak dan berkemampuan mengasuh, merawat, dan mendidik dengan cara-cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Anak ketika menjadi dewasa menjadi pribadi yang suka melakukan kekerasan kepada orang lain termasuk kepada anak-anaknya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya mempunyai cara tertentu untuk memahami sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Menurut Siswantoro (2005:54) penelitian merupakan suatu cara atau tata kerja yang kita terapkan dalam upaya pemecahan masalah secara hati-hati, teliti, dan mendalam berdasarkan bukti-bukti yang pasti meyakinkan. Tujuan dari suatu penelitian adalah untuk menemukan atau memecahkan sesuatu dan mendapatkan jawaban atas suatu masalah, oleh sebab itu dalam melakukan suatu penelitian diperlukan jenis metode penelitian yang akan digunakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara umum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul di dalam lokasi penelitian (Bungin 2011:44). Penelitian ini akan menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi yang muncul dalam Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami fenomena sosial terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Magelang.

Metode ini dipilih karena peneliti menggunakan data yang berbentuk kata (lisan), tabel, maupun gambar dalam menghasilkan suatu penelitian. Penelitian ini akan menyajikan data-data yang telah diperoleh dari lapangan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan secara spesifik dari informan untuk kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang digunakan untuk membatasi pokok permasalahan yang nantinya akan digambarkan dalam laporan penelitian. Menurut Spradley seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2016:208) menyatakan bahwa “*A focused refers to a single cultural domain or a few related domains*” yang artinya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian lebih terarah, lebih terinci dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang. Berdasarkan teori efektivitas menurut Budiani (2007:53), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program

Sasaran program dapat dilihat tepat atau tidaknya apabila hasil penelitian sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam penelitian ini sasaran program mengacu pada pasal 14 Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- b. Sosialisasi program

Sosialisasi program dapat diukur keefektifannya berdasarkan sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai eksistensi program P2TP2A secara keseluruhan melalui hasil wawancara.

- c. Tujuan program

Tujuan program dapat diukur berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini tujuan program telah ditetapkan dalam pasal 3 Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

d. Pemantauan program

Pengukuran efektivitas ini dapat dilihat berdasarkan ada atau tidaknya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program.

2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Magelang.

a. Faktor pendukung:

1) Dukungan Pemerintah.

Dukungan pemerintah berupa bantuan operasional program.

2) Pola Pikir Masyarakat.

Pola pikir masyarakat yang terbuka dapat mendukung program.

b. Faktor Penghambat:

1) Sumber Daya Manusia

Kualitas dan jumlah sumber daya manusia kurang mencukupi.

2) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dilakukannya penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas maka lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Magelang, sedangkan situs yang dipilih adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kasus kekerasan perempuan dan anak yang terbilang cukup tinggi dan telah memiliki institusi khusus dalam merespon permasalahan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data keberadaannya sangat penting dalam suatu penelitian. Sumber data penelitian dapat menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung tanpa perantara dari sumbernya pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Data primer subjek (informan) berupa opini secara individual maupun kelompok, hasil observasi dari suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan

kebutuhan peneliti dan tidak melenceng dari fokus penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan masyarakat. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang;
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Fulltimer P2TP2A Kabupaten Magelang
- e. Pekerja Sosial P2TP2A
- f. Masyarakat Kabupaten Magelang
- g. Salah satu korban KDRT

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dapat mendukung data primer yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data ini dapat berupa dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber referensi atau literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji,

menafsirkan bahkan untuk memprediksi suatu tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *interview* adalah proses pertukaran informasi antara peneliti dengan narasumber melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui teknik ini, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2016:231-232). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiterstruktur yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) namun tetap terbuka terhadap adanya kemungkinan pertanyaan lain diluar pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program P2TP2A di Kabupaten Magelang.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi di

lapangan terkait dengan objek atau fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi partisipasi aktif. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016:227), partisipasi aktif *means that the researcher generally does what others in the setting do*. Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.

3. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dilakukan dengan cara perekaman atau pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian baik berupa gambar, arsip, dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini selain mengumpulkan dokumen-dokumen penting juga mengambil gambar saat melakukan wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang digunakan peneliti untuk mengambil data, mengelola, menyajikan, menganalisis dan mendeskripsikan data atau informasi. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peneliti

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016:222). Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data

dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti berusaha memiliki pemahaman yang baik dan penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti terutama yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program P2TP2A di Kabupaten Magelang.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan sistematis yang memuat berbagai macam pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada responden. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan dalam menjawab rumusan masalah dengan batas-batas tertentu agar tidak melebar kemana-mana.

3. Perangkat Penunjang Lapangan

Perangkat penunjang lapangan dalam penelitian ini berupa buku catatan (*field note*) dan beberapa alat yang diperlukan peneliti untuk mengumpulkan data seperti alat tulis, kamera, alat perekam suara dan lain sebagainya. Perangkat penunjang ini berfungsi sebagai media pengarsipan bagi peneliti dari data yang telah didapatkan di lapangan agar dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

G. Analisis Data

Tahap penting dalam penelitian adalah analisis dan interpretasi data karena pada tahap ini kesimpulan dan hasil dari penelitian dapat diperoleh. Melalui tahap analisis data ini, peneliti mengemukakan gagasan dan temuannya berdasarkan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2016:244),

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, berdasarkan model interaktif yang dikemukakan Miles, Huberman, Saldana. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14), analisis data terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap awal dalam analisis data ini adalah pengumpulan data. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, *interview*, dan observasi. Kegiatan wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa informan yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data-data dari hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan data agar mencapai kejenuhan data sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Setelah tahap pengumpulan data, tahap berikutnya adalah kondensasi data. Kondensasi data merupakan tahap dalam analisis data dengan cara menelaah data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses pemilihan, merangkum dan memfokuskan

data pada hal-hal yang sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Peneliti harus mengabaikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian, sehingga data-data yang tersaji merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian. Kondensasi data atau proses transformasi berlanjut terus sampai penelitian di lapangan berakhir, sampai penulisan laporan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

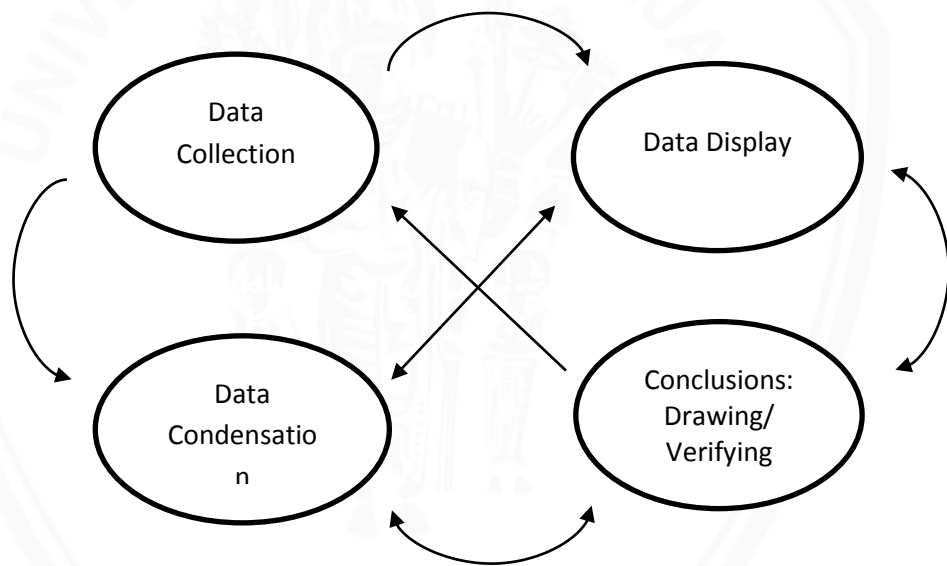
Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah penyajian data. Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga data dan informasi tersebut dapat dipahami dan dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan dapat memberikan kekayaan informasi dan pengetahuan bagi pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang

didukung teori terkait dan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti sejak awal.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-32)



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, & Saldana (2014:33)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya untuk menghasilkan tanggapan dari informan agar dapat merespon jawaban yang diinginkan dengan tujuan klarifikasi dan eksplorasi lebih dalam. Instrumen utama dari penelitian ini adalah manusia, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terkait keabsahan data yang diperoleh. Ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2016:241), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam konteks saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

F. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

a. Sejarah Kabupaten Magelang

Sejak Magelang ditetapkan sebagai Kadipaten pada tahun 1813 oleh Pemerintah Inggris sampai sekarang telah dipimpin 20 orang Bupati yaitu :

- 1) R. A Danoeningrat I (1813 – 1826)
- 2) R. A. A. Danoeningrat II (1826 – 1862)
- 3) R. T. Danoeningrat III (1862 – 1878)
- 4) R. A. Danoekoesoemo (1878 – 1908)
- 5) R. A. A. Danoe Soegondo (1908 – 1935)
- 6) Sosrodiprojo (1935 – 1945)
- 7) Said Prawirosastro (1945 – 1946)
- 8) R. Joedodibroto (1946 – 1954)
- 9) M. Ng. Arwoko (1954 – 1957)
- 10) Muchamad (Bupati) (1957 – 1958)
- 11) Soegengsomodilogo (Kepala Daerah)
- 12) Soetedjo (Bupati) (1958 – 1960)
- 13) Soegengsomodilogo (Kepala Daerah)
- 14) Drs. Adnan Widodo (1960 – 1967)

- 15) Drs. H. Achmad (1967 – 1979)
- 16) Drh. Soepardi (1979 – 1983)
- 17) Drs. Al. Soelistiya (PJ. 1983 – 1984)
- 18) M. Solikin (1984 – 1994)
- 19) Kardi (1994 – 1999)
- 20) Drs. H. Hasyim Afandi (1999 – 2004)
- 21) Ir. H. Singgih Sanyoto (2004 – 2014)
- 22) Zaenal Arifin, S.I.P. (Januari 2014 – Sekarang)

Sebelum kemerdekaan kedudukan pemerintah Kabupaten Magelang berada di ibukota Kabupaten Magelang yaitu Kota Magelang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, menegaskan bahwa ibukota Kabupaten Magelang adalah Kota Magelang. Selama revolusi kemerdekaan berlangsung, kedudukan pemerintah Kabupaten Magelang berpindah-pindah dari tempat pengungsian satu, ketempat pengungsian lain. Berturut-turut Kantor Bupati Magelang pindah dari Kota Magelang ke Dusun Clebung, Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, kemudian berpindah ke Dusun Manggoran, Kecamatan Mertoyudan, kemudian berpindah di wilayah Kecamatan Mungkid di Desa Bojong. Saat mendekati akhir masa revolusi Kantor Bupati berpindah di wilayah Kecamatan Muntilan di Desa Jumbleng, Setelah keadaan aman kembali lagi ke Kota Magelang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Kota Magelang diberi hak untuk mengatur rumah tangga sendiri. Dengan demikian di Kota Magelang berpusat empat (4) badan pemerintahan yang memiliki fungsi berbeda,

yaitu: Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, Kantor Karesidenan Kedu, dan Akademi Militer. Karena fakta-fakta tersebut maka masalah kepadatan Kota Magelang tidak terhindarkan. Disisi lain sesuai dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap pelayanan pemerintah dan pembangunan semakin meningkat maka muncul gagasan untuk memindahkan ibukota kabupaten. Gagasan tersebut menguat dengan pengarahannya Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1979, No: OP.140/1979 perihal: Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak bulan Juli 1979, saat itu Bupati Magelang dijabat oleh Drh. Soepardi diadakan kerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang untuk mengadakan survey lokasi ibukota Kabupaten yang menghasilkan alternatif ibukota kabupaten, yaitu: Kecamatan Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Secang. Hasil survey tersebut dikuatkan oleh survey ulang yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat No: 135/3492/PUOD, tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Selanjutnya pemindahan ibukota kabupaten ke Kota Mungkid ditetapkan berdasarkan PP No : 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Magelang dari wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang tanggal 4 Agustus 1982, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid. Kota Baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Mungkid, dan Mertoyudan yang terdiri atas Desa Mendut, Sawitan dan Deyangan.

Sejak diterbitkannya PP Nomor 21 Tahun 1982, maka diadakan persiapan fisik maupun administrasi. Persiapan fisik dilaksanakan dengan membangun diatas tanah seluas 8,08 ha, yang meliputi pembangunan Pendopo, Kantor Sekretariat, Gedung DPRD, Gudang, Garasi, Kantor Dinas Otonom dan Dinas Non Otonom. Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Magelang diresmikan penggunaannya oleh PJ Bupati Magelang Drs. AL Soelistiya dan Ketua DPRD Faishal Soenarto pada tanggal 23 Februari 1984.

Pada waktu itu juga dibangun sarana air minum, Gedung SMP dan SMA, Lapangan Drh. Soepardi, pelebaran jalan Karet-Sawitan dan pembangunan Masjid An Noor. Kota Mungkid diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah M Ismail, An. Menteri Dalam Negeri pada Prasasti peresmian Kota Mungkid, berada di halaman Kantor Pemerintah Kab. Magelang, dan setiap tahun pada tanggal 22 Maret diperingati sebagai hari jadi Kota Mungkid.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Magelang berada di garis $7^{\circ}28'$ LS serta diantara $110^{\circ}13'$ BT dengan luas wilayah 1.085,73 km². Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Di bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Boyolali) terdapat Gunung Merbabu (3.141 meter dpl) dan Gunung Merapi (2.911 m dpl). Di bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo) terdapat Gunung Sumbing (3.371 m dpl). Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh. Pada bagian tengah mengalir Kali Progo

beserta anak-anak sungainya menuju selatan. Di Kabupaten Magelang juga terdapat Kali Elo yang membelah dua wilayah ini.

Batas wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Utara	: Kab. Temanggung dan Kab. Semarang
Timur	: Kab. Boyolali dan Kab. Semarang
Selatan	: Kab. Purworejo dan Provinsi DIY
Barat	: Kab. Temanggung dan kab. Wonosobo

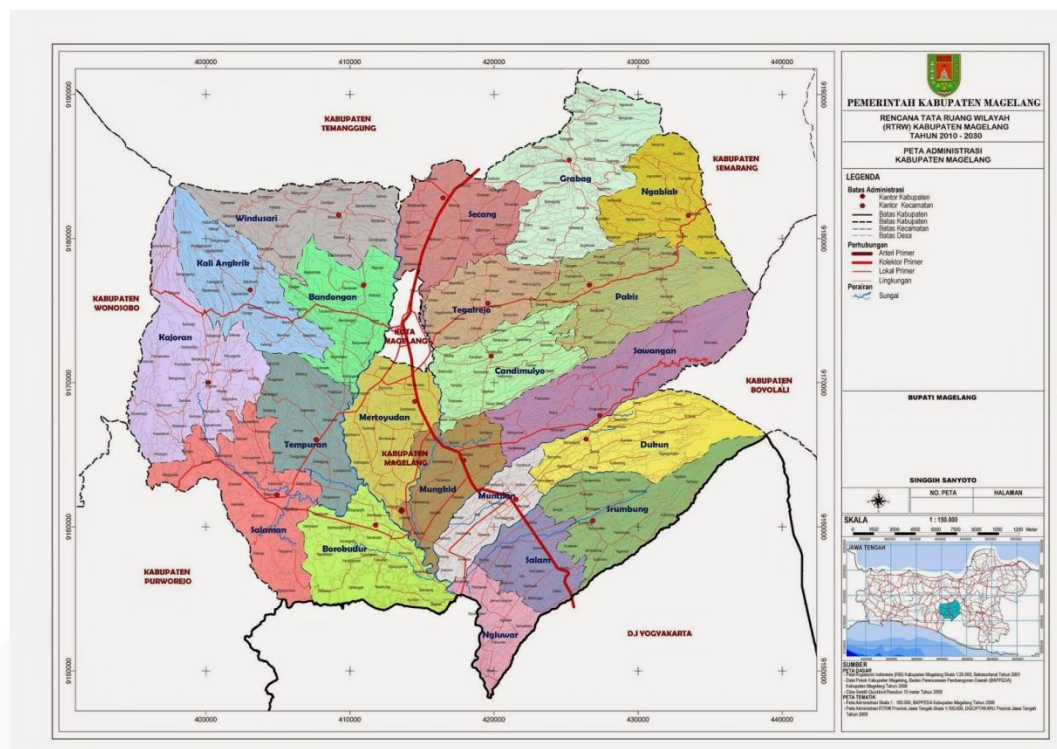
Wilayah Kabupaten Magelang ditinjau dari segi geografisnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama bagian dataran rendah yang terletak ditengah-tengah yang merupakan lembah dari Sungai Progo dan Sungai Elo, kedua bagian barat yang merupakan wilayah yang terletak di lereng Gunung Sumbing dan pegunungan Menoreh serta bagian timur yaitu wilayah yang terletak di sepanjang lereng Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo dan Andong merupakan daerah pegunungan dan ketiga bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang merupakan dataran tinggi. Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan topografi berupa dataran dan pegunungan, yang sebagian besar (47,33%) berada pada ketinggian 200 - 500 meter di atas permukaan laut, sedang bentang daratan yang mempunyai ketinggian 500 - 1000 meter di atas permukaan laut sekitar (48,64%) dan ketinggian lebih 1000 meter di atas permukaan laut sekitar (4,03%). Berdasarkan data yang terdapat pada Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSASD) Kabupaten Magelang Tahun 2000, Kabupaten Magelang yang

terdiri atas 21 kecamatan, mempunyai kisaran ketinggian 200-3246 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri maupun kebutuhan yang lain. Dari segi hidrologi, di wilayah Kabupaten Magelang sebagai wilayah dataran tinggi cawan, di tengah-tengah merupakan daerah dataran dengan keadaan pengairan yang cukup baik, yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan pegunungan yang memiliki banyak mata air.

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo dan DAS Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat dua sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. DAS Progo ini meliputi daerah di wilayah Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto hanya sebagian kecil di kecamatan Salaman dan Kajoran.

Potensi Hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, seperti: Air permukaan yang berupa sungai-sungai baik besar maupun kecil, misalnya Sungai Blongkeng dan Sungai Pabelan; Air tanah yang diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan lahan pertanian.



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Magelang
Sumber : Kabupaten dalam Angka 2017, BPS Kabupaten Magelang

c. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang yang bersumber dari data Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2017, adalah 1.257.213 jiwa yang terdiri dari 630.821 jiwa laki laki dan 626.302 jiwa perempuan, yang huniannya tersebar di 21 kecamatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, demikian pula pada tingkat kecamatan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang dapat ditinjau dengan 2 cara, yaitu tinjauan kepadatan Brutto, yaitu tinjauan jumlah penduduk dibagi dengan seluruh wilayah kabupaten, dan tinjauan kepadatan Netto, yaitu tinjauan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah terbangun.

Adat istiadat di suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari karakteristik masyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan dari masyarakat yang dipercaya secara turun-temurun dan telah dianggap sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Karakteristik masyarakat dapat dilihat dari budaya masyarakatnya. Budaya dalam uraian ini diartikan secara fungsional sebagai perilaku masyarakat dan bukan sebagai artefak. Dalam lingkup Jawa Tengah dikenal 5 lingkup budaya, yaitu Pesisir Utara Bagian Barat, Pesisir Utara Bagian Timur, Negari Gung, Banyumasan dan Bagelan. Kabupaten Magelang termasuk lingkup budaya Negari Gung, terutama dari pengaruh kesultanan Kraton Yogyakarta. Lingkup budaya ini meliputi bekas daerah swapraja Kasunanan Surakarta dan mangkunegara.

Kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Magelang tidak bisa dilepaskan dari karakteristik lingkup budaya Negari Gung, yang terpengaruh oleh tradisi Kraton Yogyakarta sehingga sifat kegotongroyongan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat menonjol. Sebagai perwujudannya adalah media kesenian yang mencerminkan budaya masyarakat Kabupaten Magelang antara lain Topeng Ireng, Kubro, Jathilan, Dayakan, Kuntulan dan lain lain.

Jumlah atau perkembangan penduduk berdasarkan struktur penduduk menurut agama dapat dilihat bahwa sekitar 96% penduduk di wilayah Kabupaten Magelang menganut agama Islam. Kemudian disusul dengan jumlah penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Budha dan yang terendah adalah jumlah penduduk yang beragama Hindu. Masih pula berkembang kepercayaan di Kabupaten Magelang berupa:

- Percaya pada kekuatan ghoib, kesaktian melalui laku (nglakoni) dan tirakat. Dalam perilaku politik terdapat anggapan bahwa kekuatan gaib akan menambah kewibawaan melalui nyadran;
- Di Kabupaten Magelang dalam kehidupan beragama sudah sejak abad 8 masehi sampai sekarang menunjukkan 'ketaqwaan dan ketaatannya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan agama di wilayah Kabupaten Magelang. Pengaruh dalam kehidupan spiritual budaya berupa kegiatan-kegiatan spiritual yang dituangkan dalam kegiatan adat, seperti: Upacara Ruwahan (Nyandran) yang dilakukan hampir seluruh masyarakat pada bulan Ruwah (bulan Jawa) antara tanggal 15 – 25; Upacara Suran yang dilakukan pada bulan Suro; Upacara kematian dan kelahiran; Upacara spirituil dalam memulai dan mengakhiri kegiatan pembangunan; Upacara khusus dalam mengantisipasi adanya bencana alam, seperti gempa bumi dan meletusnya Gunung Merapi.

Objek wisata yang berada di Kabupaten Magelang terbagi menjadi dua yaitu wisata alam dan wisata budaya. Magelang merupakan kawasan yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang sekaligus menjadi obyek wisata alam yang menarik yakni Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan Gunung Telomoyo, Gunung Andong dan Gunung Kekep. Selain itu Magelang mempunyai dua sungai besar yang sering digunakan untuk wisata arung jeram yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo. Wisata alam juga dikembangkan di daerah dataran tinggi dilengkapi dengan fasilitas outbound dan penginapan antara

lain Ketep Pass, Mangli Wana Villas, dan Kopeng. Dengan kontur tanah yang ada di Kabupaten Magelang, banyak sekali obyek-obyek wisata air terjun seperti Kedung Kayang, Air Terjun Sekar Langit, dan Air Terjun Seloprojo. Sedangkan wisata budaya adalah berbagai situs sejarah seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Canggal, Candi Gunungwukir, Candi Lumbung, Candi Pendem, Candi Aso, Candi Ngawen dan Candi Selogriyo.

d. Kondisi Ekonomi

Pertambangan pasir dan batu menjadi komoditas utama Kabupaten Magelang dengan adanya Gunung Merapi yang sangat aktif menghasilkan materialnya. Hanya ada 2 kecamatan di Kabupaten yang tidak menghasilkan tambang yakni Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Candimulyo.

Keberadaan Kabupaten Magelang yang berada di antara gunung-gunung membuat tanah di wilayah tersebut cocok untuk pertanian. Besarnya sektor pertanian ini membuat sektor ekonomi menjadi dominan di dalam kontribusi PDRB Kabupaten Magelang. Hal ini tentu juga didukung dengan irigasi dan banyaknya mata air yang terdapat di Kabupaten Magelang.

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pengembangan budidaya perikanan. Lokasi yang cocok untuk pengembangan pertanian jenis ini terdapat di 19 kecamatan, antara lain Kecamatan Mungkid dan Tempuran, khususnya budi daya ikan air tawar di kolam, ikan lele di kolam, budidaya ikan air tawar di sawah (mina padi) dan budidaya ikan air tawar di perairan umum dan pembenihan ikan.

Kawasan peternakan meliputi kawasan pertanian yang diperuntukkan untuk peternakan sapi, kambing, domba maupun unggas. Lokasi yang bisa dikembangkan untuk aktivitas ini adalah kawasan yang menyediakan tanaman makanan ternak. Di Kabupaten Magelang lokasi yang berpotensi untuk pengembangan aktivitas ini hampir di semua kecamatan, antara lain berada di kecamatan Mungkid untuk itik leher putih, Tempuran untuk ternak ayam. Ternak besar dan kecil yang dibudidayakan adalah sapi perah, sapi biasa, kerbau, kuda, sedangkan ternak kecil yang dikembangkan adalah kambing atau domba dan babi yang hanya dipelihara di Kecamatan Mertoyudan, Pakis dan Ngablak.

e. Visi dan Misi Kabupaten Magelang

Visi : Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)

Misi :

1. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama;
2. Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;
4. Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup;

5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Demokratis;
6. Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat.

2. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang (Dinas Sosial PPKB PPPA)

a. Profil Dinas Sosial PPKB PPPA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dasar hukum pembentukan Dinas ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang; dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial,

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Program
 - 2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
2. Seksi Pemberdayaan Sosial.

d. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga, membawahi:

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:

1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
2. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana.

g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

h. UPT, membawahi Subbagian Tata Usaha; dan

- i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak;

- f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- k. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak, dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magelang

a. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A

Gagasan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan muncul pertama kali melalui Kesepakatan Tiga Menteri dan Kapolri (KATMAGATRIPOL) pada tahun 2002. Sejak saat itu upaya pemerintah untuk menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan terus menguat, melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan terpadu baik di tingkat nasional maupun daerah, serta melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pembentukan P2TP2A yang sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sejak tahun 2002 merupakan respon pemerintah terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Keberadaan P2TP2A sebagai jawaban atas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada awalnya adalah gagasan dan komitmen pemerintah bersama masyarakat sipil dalam menghadirkan layanan yang menyeluruh dan terpadu bagi korban, agar korban dapat mengakses keadilan dan kebutuhannya memulihkan diri dan kehidupannya. Keterpaduan mekanisme layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan berangkat dari kesadaran bahwa pengalaman kekerasan yang dialami korban sangatlah beragam dan dampak yang ditimbulkan pun juga *multi impact*, mempengaruhi segala aspek kehidupan korban. Oleh karena itu penanganannya pun juga membutuhkan beragam intervensi dan menyeluruh.

P2TP2A saat ini telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia (Data KPPPA, 2016). Pelayanan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Semanah. Namun demikian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi, maka PPT secara resmi berubah menjadi P2TP2A Semanah. Lebih lanjut P2TP2A ini memiliki Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan. Sekretariat P2TP2A Semanah beralamat di Jalan Letnan Tukiyat No. 40, Kota Mungkid. Selain itu terdapat P2TP2A di tingkat kecamatan, yaitu:

- 1) P2TP2A Kecamatan Salaman;

- 2) P2TP2A Kecamatan Borobudur;
- 3) P2TP2A Kecamatan Ngluwar;
- 4) P2TP2A Kecamatan Salam;
- 5) P2TP2A Kecamatan Srumbung;
- 6) P2TP2A Kecamatan Dukun;
- 7) P2TP2A Kecamatan Sawangan;
- 8) P2TP2A Kecamatan Muntilan;
- 9) P2TP2A Kecamatan Mungkid;
- 10) P2TP2A Kecamatan Mertoyudan;
- 11) P2TP2A Kecamatan Tempuran;
- 12) P2TP2A Kecamatan Kajoran;
- 13) P2TP2A Kecamatan Kaliangkrik;
- 14) P2TP2A Kecamatan Bandongan;
- 15) P2TP2A Kecamatan Candimulyo;
- 16) P2TP2A Kecamatan Pakis;
- 17) P2TP2A Kecamatan Ngablak;
- 18) P2TP2A Kecamatan Grabag;
- 19) P2TP2A Kecamatan Tegalrejo;
- 20) P2TP2A Kecamatan Secang; dan
- 21) P2TP2A Kecamatan Windusari;

Selain P2TP2A, pemerintah daerah Kabupaten Magelang juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). PPT dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada

perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi dan konseling. PPT Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa yang bersangkutan. Sedangkan PPT Kelurahan terdiri atas:

- 1) PPT Kelurahan Sawitan;
- 2) PPT Kelurahan Mendut;
- 3) PPT Kelurahan Sumberrejo;
- 4) PPT Kelurahan Muntilan;
- 5) PPT Kelurahan Secang;

b. Tugas dan Fungsi

Secara umum P2TP2A Kabupaten Magelang bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Lebih jelasnya sasaran strategis P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang yaitu:

- 1) Memperkuat jejaring perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- 2) Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- 3) Mendorong peran pemerintah dalam pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; serta
- 4) Mendorong masyarakat agar melakukan pencegahan tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak bertugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Fungsi P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang:

- 1) Pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- 2) Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- 3) Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, P2TP2A Semanah menyelenggarakan layanan pengaduan; kesehatan; bantuan hukum; pemulangan; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; pendidikan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

c. Visi dan Misi

Visi P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang : “Prima dan Profesional dalam Pelayanan serta Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”

Misi P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang adalah memberikan pelayanan yang optimal terpadu berupa sosialisasi dan advokasi, pelayanan secara terpadu, rasa aman dan nyaman serta kemudahan bagi korban, pelayanan rujukan dan pasca pemulihan bagi korban.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang meliputi:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua;

- 3) Sekretariat;
- 4) Divisi pencegahan dan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/diskriminasi;
- 5) Divisi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/diskriminasi;
- 6) Divisi pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/diskriminasi.

Lembaga pelayanan jejaring P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang, diantaranya:

- 1) Polres Magelang
- 2) RSUD Muntilan
- 3) LSM Sahabat Perempuan
- 4) PSMP Antasena
- 5) Lembaga Advokasi Bumi
- 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 7) Disnakersostrans Kabupaten Magelang
- 8) Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
- 9) Kementerian Agama Kabupaten Magelang
- 10) Pengadilan Agama Kabupaten Magelang
- 11) Pengadilan Negeri Mungkid
- 12) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
- 13) Balai Pemasyarakatan
- 14) Dinas Kesehatan beserta Puskesmas se-Kabupaten Magelang

15) Polsek se-Kabupaten Magelang

G. Penyajian Data**1. Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)****a. Ketepatan Sasaran Program**

Sasaran program adalah objek kebijakan yang dituju dengan dilaksanakannya suatu program melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sasaran dapat dikatakan tercapai apabila tepat mengenai sasarannya. Adapun sasaran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah perempuan dan anak di Kabupaten Magelang yang mengalami kekerasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Ibu Retno Indriastuti, SKM., M.Kes.

“Sasaran program ya tentu saja perempuan dan anak masyarakat Kabupaten Magelang yang jadi korban kekerasan. Sesuai dengan nama programnya kan ada embel-embel perempuan dan anak. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan kalo ada korban kekerasan yang laki-laki sih ya tetap kita tangani. Jarang tapi ya. Makanya fokus kita ke perempuan dan anak karena memang banyak kasus kekerasan yang korbannya berasal dari mereka.” (Wawancara pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB di Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang)

Senada dengan pernyataan dari Ibu Retno selaku Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA diatas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Drs. Anang Kusbandianto, membenarkan bahwa sasaran program P2TP2A adalah perempuan dan anak korban kekerasan.

“Ya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Di kabupaten Magelang tapi bukan seluruh Indonesia karena lingkup kita memang se-kabupaten aja, itu pun sudah sangat luas ya, 21 kecamatan. Sejauh ini sih sudah tepat sasaran juga saya amati.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang)

Menurut beliau, sasaran program adalah perempuan dan anak korban kekerasan di regional Kabupaten Magelang yang mencakup 21 kecamatan. Beliau juga berpendapat bahwa sasaran program sudah tepat berdasarkan pengamatan. Peneliti kemudian mencoba untuk mengonfirmasi terkait ketepatan sasaran dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Tri Setyowati, S.H. yang membidangi P2TP2A.

“Pastinya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, mbak. Sasarannya sudah sangat tepat dari yang sudah kita tetapkan. Berdasarkan laporan-laporan yang masuk memang korban kekerasan banyak dari perempuan dan anak. Perempuan dan anak memang lebih membutuhkan bantuan dan perlindungan.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB)

Ibu Tri menambahkan selama ini sasaran sudah tepat jika dilihat dari banyaknya laporan-laporan yang masuk mengenai korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan dan anak. Hal ini juga diperkuat oleh narasumber Ibu Nur Azizah, S.H. selaku Tenaga Kontrak Dinas Sosial PPKB PPPA sebagai fulltimer P2TP2A Kabupaten Magelang.

“Ya sudah tepat sasaran. Selama ini banyak kasus kekerasan di Kabupaten Magelang yang mana yang jadi korban pasti perempuan dan anak. Laki-laki jarang sekali, justru banyak jadi pelaku. Saya ga bermaksud membedakan, kondisi psikis perempuan dan anak itu kan rentan ya, mereka sering menjadi objek, jadi memang merekalah yang perlu dilindungi.” (Wawancara tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)

Lebih lanjut, Ibu Kuswati selaku pekerja sosial Dinas Sosial PPKB

PPPA Kabupaten Magelang memiliki pendapat yang sama.

“Korban kekerasan perempuan dan anak. Selama ini saya sering menangani perempuan dan anak korban kekerasan sama Ibu Azizah dan Ibu Tri. Nah tapi pernah ada laporan masuk yang bukan tentang kekerasan ke P2TP2A seperti anak yang gak mau sekolah atau anak yang hiperaktif. Itu kan bukan ranah kita hahaha. Laporan seperti itu sangat jarang sekali tapi pernah ada. Tapi ya kita kan dasarnya melayani masyarakat, jadi tetap kita tangani tapi kita alihkan ke bidangnya karena fokus kita di kekerasan.” (Wawancara tanggal 11 Mei 2018 pukul 13.30 WIB di Sekretariat P2TP2A Kabupaten Magelang)

Pernyataan mengenai tepat atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya didukung oleh data rekapitulasi laporan kasus yang masuk ke Dinas Sosial PPKB PPPA dari rentang tahun 2013 hingga 2017. Data tersebut membuktikan bahwa sasaran program P2TP2A Semanah sudah tepat dilihat dari laporan aduan yang masuk menyatakan bahwa sebagian besar kasus memposisikan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Namun tidak menutup kemungkinan P2TP2A Semanah menerima aduan yang memposisikan laki-laki sebagai korban meskipun jumlahnya sangat kecil.

Tabel 3. Rekap Laporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang

Tahun	Kekerasan Anak	Kekerasan berbasis Gender	
		Perempuan	Laki-laki
2013	45	75	-
2014	30	52	-
2015	54	44	1
2016	61	52	-
2017	46	70	-

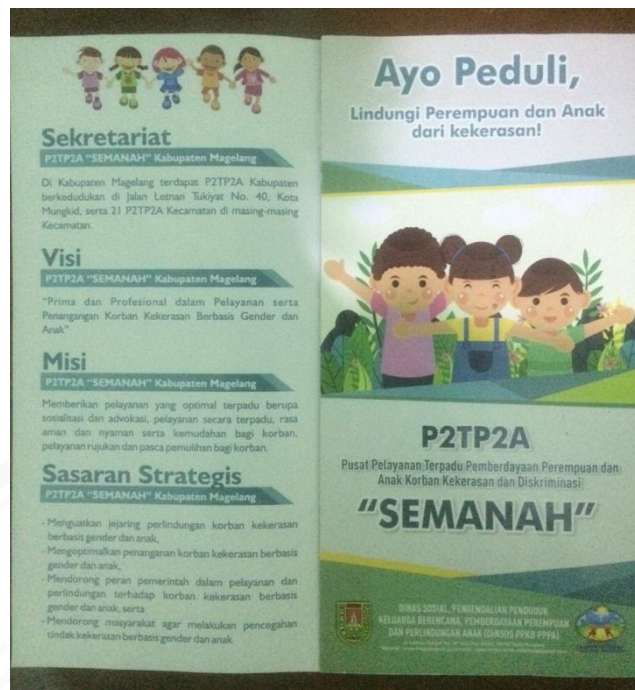
Sumber: Data Kasus P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang

Dari penggalan wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran program P2TP2A Semanah adalah perempuan dan anak di Kabupaten Magelang yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A Semanah dianggap tepat sasaran karena dinilai berdasarkan laporan-laporan pengaduan kasus yang masuk selama kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Perempuan dan anak dianggap lebih membutuhkan bantuan dan perlindungan karena mereka rentan menjadi korban kekerasan. Bantuan dan perlindungan ini dibutuhkan agar mereka tidak lagi merasa terancam ketika menjadi korban kekerasan.

b. Sosialisasi Program

Agar tujuan dapat tercapai, P2TP2A Semanah telah melakukan sosialisasi dengan berbagai macam bentuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Tri Setyowati, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

“Wah kalau sosialisasi sering mbak. Bentuknya? Ya banyak. Sosialisasi langsung ke kecamatan, kelurahan ya sering terutama untuk mengenalkan PPT tingkat kecamatan kelurahan dan desa. Kalau gak gitu ya masyarakat gak bakal tau kalo ada P2TP2A. Ini kita juga bikin pamflet, poster, banner gede yang dipasang di titik-titik strategis di jalan biar orang yang gak ikut sosialisasi langsung juga bisa tau.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB)



Gambar 5. Brosur/Pamflet P2TP2A Semanah

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Senada dengan pernyataan dari Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak diatas, fulltimer P2TP2A, Ibu Nur Azizah, S.H., menambahkan bentuk sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

“Ya sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung itu kita turun langsung ke kecamatan, kelurahan, desa di Kabupaten Magelang. Alhamdulillah semua kecamatan sudah, untuk kelurahan dan desa masih berjalan ya, tapi biasanya kami minta bantuan di kecamatannya biar lebih memudahkan. Respon masyarakat juga bagus menurut saya, mereka antusias ingin membantu. Mereka jadi lebih berani melapor. Aduan yang masuk juga lebih beragam. Kalau untuk sosialisasi tidak langsung kita ada brosur, banner, poster. Pernah juga kita siaran kerjasama dengan radio Gemilang FM.” (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)



Gambar 6. Poster P2TP2A Semanah

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang menjelaskan mengenai sosialisasi P2TP2A.

“Oh banyak dong mbak. Sosialisasi langsung ke kecamatan, kelurahan sekalian untuk mengenalkan PPT. Sistemnya ya hampir kayak seminar gitulah mbak, kita ngumpulin warga di balai. Melalui rapat dengan perangkat-perangkat desa juga. Untuk sosialisasi tidak langsung, kita sudah nyebar brosur, menempel poster, masang banner besar di pinggir jalan, siaran radio di Gemilang FM juga. Untuk web atau aplikasi kayak LAPOR gitu belum ada tapi sedang kita coba kembangkan karena ya memang butuh orang-orang khusus untuk mengelola semacam itu sementara kita tenaganya gak ada yang ahli.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB di Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Drs. Anang Kusbandianto selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

“Kita biasanya mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat. Jadi ngumpulin warga dibantu kecamatan gitu di balai. Pamflet, poster dan baliho juga kita sebar. Pernah juga talkshow di radio Gemilang. Kalau untuk media sosial masih belum ya padahal jamannya internet sekarang apa-apa lebih mudah. Ya simpel karena gak ada tenaga IT yang ngelola aja.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB)



Gambar 7. Sosialisasi P2TP2A di Balai Kecamatan

Sumber: Dokumentasi P2TP2A Semanah

Berbeda dengan Ibu Kuswati, beliau mengaku kurang mengetahui secara rinci terkait sosialisasi karena posisi beliau sebagai Pekerja Sosial.

“Saya kurang tau gimana-gimananya mbak, soalnya saya kan peksos disini jadi kalau urusan sosialisasi bisa dikatakan bukan ranah saya. Peksos disini kan tugas utamanya untuk membantu menangani kasus saja karena memang kurang pegawai banget. Tapi sejauh ini saya tau-tau aja kalo Dinsos emang ngadain sosialisasi ke kecamatan kelurahan gitu-gitu. Oh, ada juga baliho di pinggir jalan gitu tentang stop kekerasan sama brosur-brosur gitu. Ibu Tri juga pernah bilang kalau pernah ada dulu siaran di radio tapi saya lupa dimana.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2018 pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan penggalan-penggalan wawancara diatas Dinas Sosial PPKB PPPA telah menempuh berbagai macam bentuk sosialisasi baik itu langsung maupun tidak langsung demi terlaksananya P2TP2A Semanah sesuai tujuan. Sosialisasi langsung dilakukan di tiap-tiap kecamatan dengan mengumpulkan warga di balai warga. Warga dapat membantu melaporkan kasus kekerasan melalui telepon, sms, *whatsapp* atau mendatangi kantor Dinas Sosial PPKB PPPA langsung. Mereka juga dapat melaporkan pada PPT kecamatan, kelurahan maupun desa. Sedangkan sosialisasi tidak langsung yang telah ditempuh adalah menyebarkan pamflet dan poster, memasang banner di titik-titik strategis tertentu, melakukan siaran bersama radio Gemilang FM. Website dan aplikasi perangkat pintar belum ada namun sedang berusaha dikembangkan.



Gambar 8. Baliho P2TP2A
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Peneliti mencoba menelaah dari sisi masyarakat atau sasaran sosialisasi yaitu warga Kabupaten Magelang untuk mengetahui seberapa dalam

masyarakat memahami P2TP2A. Salah satu warga kecamatan Srumbung, Ibu Sri Dwi mengaku tidak mengetahui adanya P2TP2A namun sedikit paham mengenai konsep program tersebut secara umum. Beliau mengetahui harus melapor apabila mengalami atau melihat tindakan kekerasan perempuan dan anak ke Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

“Oh saya baru tau mbak kalau namanya P2TP2A. Agak susah sih ya namanya, gak hapal saya haha. Saya taunya pokoknya kalo kita ngalami atau tau ada kasus kekerasan disekitar boleh melaporkan ke pak RT atau Lurah gak diam saja. Gratis. Itu juga saya tau dari tetangga yang cerita. Kalau baliho di pinggir jalan gitu saya juga gatau mbak apa saya yang gak pernah merhatiin ya hahaha” (Wawancara dengan Ibu Sri Dwi, warga kecamatan Srumbung pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 11.00)

Warga kecamatan Mertoyudan, Bapak Priyono mengaku sudah mengetahui eksistensi program ini sejak mengikuti sosialisasi di balai kecamatan Mertoyudan. Beliau menyambut positif adanya P2TP2A Semanah.

“Tau mbak. P2TP2A itu kan yang nangani kalau ada KDRT, pelecehan, pemukulan, gitu-gitu mbak. Saya tau dari sosialisasi di balai kecamatan waktu itu, pak camat ngasih woro-woro suruh kumpul di balai. Ya sudah saya ikut. Ternyata bagus programnya, gratis. Kan selama ini yang ditakutkan wong cilik kayak saya gini itu kalo bayar mahal. Eh ternyata gratis bahkan ini kan pertemuan kedua buat rembug pembentukan pengelola di kecamatan mbak.” (Wawancara tanggal 28 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Berbeda dengan salah satu korban yang berhasil peneliti wawancara, Ibu X mengaku awalnya kurang mengetahui P2TP2A. Namun setelah mengalami kasus kekerasan beliau baru menyadari adanya P2TP2A Semanah.

“Dulu gak tau mbak tapi sekarang tau. Saya tau kalo pemerintah nyediain fasilitas begini juga dikasih tau temen saya setelah saya curhat tentang apa yang saya alami. Kalau baliho di jalan gitu saya pernah liat mbak di pertigaan Secang deket pasar itu. Tapi isinya seinget saya bilang stop kekerasan perempuan dan anak gitu tapi

saya gak ngeh kalo ada nama programnya apa tadi, P2TP2A ya. Susah ya namanya haha. Ya jujur saya baru merhatiin baliho-baliho di jalan gitu setelah saya mengalami kejadian ini sendiri. Awalnya ya saya hanya lewat ngeliat aja trus udah oh gitu hehe. Terbantu banget saya mbak, awalnya ga percaya kalo gratis eh beneran gratis. Saya gatau mau kemana soalnya orang awam kayak begini takut dibohongin diperas juga kan ya hehe.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan penggalan wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Magelang diatas dapat diketahui bahwa masih ditemukan masyarakat yang kurang memahami P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang. Masyarakat mengetahui apabila harus melapor apabila mengetahui adanya kekerasan perempuan dan anak disekitarnya namun masih belum mengetahui apabila ada program yang khusus menangani hal tersebut.

c. Tujuan Program

Sebuah organisasi tidak akan terbentuk tanpa adanya tujuan. Sama halnya dengan program, apabila tidak memiliki tujuan tertentu maka program tersebut tidak akan berarti. Tujuan ibarat nyawa karena aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di dalam organisasi maupun program tentunya disusun agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sehubungan dengan tujuan P2TP2A, peneliti mewawancarai Bapak Drs. Anang Kusbandianto selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

“Gini mbak itu untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Setiap tahun kan bertambah itu kasusnya. Wujud perhatian pemerintah terhadap korban kasus kekerasan perempuan dan anak yang marak.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB)

Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Ibu Retno Indriastuti, SKM. M.Kes menyatakan tujuan P2TP2A Semanah.

“Tujuan ya memberikan pelayanan. Pelayanan yang berdasarkan aduan. Ada aduan masuk kemudian aduan itu kita cek ke lapangan untuk verifikasi validasi kebenarannya seperti apa. Kemudian setelah dicek korban kemudian ada istilahnya anamese. Siapa korbannya, siapa pelakunya, kejadiannya dimana kayak gitu-gitu. Setelah itu baru kita lakukan pendampingan terutama pada korban. Nah pendampingan itu bisa berupa pendampingan kesehatan maupun bantuan hukum.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)

Hal senada dikemukakan oleh Ibu Tri Setyowati selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Magelang.

“Ya menangani korban kekerasan, ya melindungi korban, ya mencari solusi, ya memberikan pelayanan lah intinya kepada sasaran P2TP2A.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB).

Tujuan P2TP2A diperkuat oleh Ibu Nur Azizah, S.H. selaku fulltimer P2TP2A.

“Tujuan dilaksanakan P2TP2A ya melindungi anak dan perempuan dari tindak kekerasan.” (Wawancara tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)

Hal yang sama juga ditambahkan dalam wawancara dengan Ibu Kuswati selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

“Membantu menyelesaikan masalah kekerasan perempuan dan anak yang muncul. Banyak lho mbak korban yang gak berani ngomong, gak berani lapor atau bahkan mau lapor bingung kemana. Untung masyarakat sudah mulai sadar ya, mau melapor kalau ada kekerasan di sekitarnya.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2018 pukul 13.30 WIB)

Dari sisi masyarakat, narasumber yang bernama Bapak Priyono selaku warga Kecamatan Mertoyudan pun memiliki pernyataan senada.

“Nangani korban kekerasan perempuan dan anak lah mbak. Melindungi kalau misal ada yang diancam akan dibunuh kalo berani melapor gitu kan butuh dilindungi. Setau saya begitu.” (Wawancara tanggal 28 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Warga kecamatan Srumbung, Ibu Sri Dwi menyebutkan bahwa tujuan P2TP2A adalah untuk membantu menolong korban kekerasan.

“Karena saya awalnya gak begitu tau ya kalo ada program begitu, begitu tau ya mungkin tujuannya buat nolongin orang-orang yang kena kekerasan. Yang utama anak-anak dan wanita.” (Wawancara tanggal 12 Mei 2018 pukul 11.00 WIB)

Lebih lanjut salah satu korban KDRT, Ibu X memberikan pendapatnya terkait tujuan P2TP2A Semanah.

“Oh tujuannya kalo menurut saya buat nolongin korban kekerasan terutama yang kurang mampu. Eh gak hanya yang kurang mampu ding, ada juga yang kaya gitu saya pernah nanya ke petugas Dinsosnya. Pokoknya buat anak-anak dan perempuanlah.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018 pukul 10.15 WIB)

Dari penggalan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan P2TP2A Semanah adalah memberikan pelayanan prima kepada korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Bentuk pelayanan yang dimaksud dapat berupa pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan pengaduan, pelayanan pemulangan, pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Magelang.

d. Pemantauan Program

Pemantauan atau pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui kendala atau permasalahan apa saja yang terjadi agar dapat melakukan perbaikan dan perencanaan yang lebih matang kedepannya. Terkait dengan pemantauan

P2TP2A Semanah, Ibu Retno Indriastuti selaku Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA memaparkan beberapa langkah yang telah ditempuh dalam proses pemantauan.

“Pemantauan program itu kami lakukan bersama dengan teman-teman di bidang itu dalam bentuk rapat koordinasi biasanya. Rapat koordinasi itu kita jadwalkan satu tahun 4 (empat) kali. Itu yang rutin, maksudnya di forum itu kita bahas segala permasalahan tentang pelayanan ini. Tapi kalo membutuhkan rapat mendadak, rapat yang penting ya kumpul biasanya teman-teman kita bahas kasus penyelesaiannya seperti apa, seperti itu bagian dari monitoring yang kami lakukan. Kemudian untuk monitoring yang lain itu kami lakukan melalui laporan. Ya jadi laporan mengenai perkembangan kasus dan penanganannya itu menjadi alat monitoring P2TP2A. Kemudian monev lagi ya pada waktu ketemu dengan kelompok masyarakat, pada waktu kita ke lapangan, mungkin tidak secara khusus ya, bisa sambil ketemu dengan masyarakat atau teman-teman kedinasan gitu saya tanyakan ke mereka bagaimana pendapat mereka tentang pelayanan-pelayanan yang selama ini P2TP2A Semanah berikan. Sehingga itu menjadi masukan bagi Dinas Sosial khususnya saya, apa sih yang kekurangan yang masih dirasakan masyarakat. Apa masalahnya, apa usulannya, atau apa kendalanya. Tiap tahun kita juga bikin laporan yang disampaikan ke Pak Bupati dan itu menjadi indikator kinerja kami.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Retno Indriastuti diatas, pemantauan yang telah dilakukan adalah pemantauan dari internal organisasi, yakni dari pihak Dinas Sosial PPKB PPPA itu sendiri. Masukan-masukan yang berasal dari rekan sejawat maupun masyarakat juga menjadi bahan evaluasi bagi P2TP2A Semanah. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Drs. Anang Kusbandianto.

“Pas rapat mbak, rapat koordinasi. Itu kadang biasanya kita undang lembaga jejaring juga dengan tujuan biar ada dari pihak luar yang mengevaluasi bagaimana sih selama ini pelaksanaan P2TP2A Semanah. Saran dari mereka pasti kita dengarkan demi kebaikan P2TP2A kedepan kan. Justru kita berterimakasih sekali

kalau ada kritik saran. Berarti kan program kita diperhatikan dengan baik oleh mereka.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 09.20 WIB)

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Seksi

Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Magelang.

“Dari lembaga luar yang mengevaluasi itu dari propinsi dan pusat. Jadi ya pemprov dan kementerian itu pasti menilai kita. Pernah kemarin itu provinsi melakukan sidak ke sini. Sebagai monitoring dan evaluasi ya, apakah daerah berhasil mengimplementasikan atau tidak. Bagaimana perkembangan program selama ini ada progress atau tidak. Tapi seringkali sih kita dikasih kuesioner gitu disuruh ngisi terkait monev P2TP2A. Rapat koordinasi trus bikin laporan ke bupati secara berkala itu juga bagian dari monev yang kita upayakan agar P2TP2A Semanah lebih oke. Kemudian dari mitra kerja kita, Sahabat Perempuan gitu kan mungkin bikin laporan pemantauan. Ya monggo aja, kami terbuka apabila ada lembaga yang mau mengevaluasi. Kan ini pelayanan untuk masyarakat.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB)

Berbeda hasil wawancara dengan Fulltimer P2TP2A Semanah yang merupakan tenaga kontrak. Ibu Nur Azizah, S.H. mengaku kurang terlalu mengetahui terkait pemantauan program. Menurut beliau, pemantauan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi setiap tahunnya pasti diselenggarakan.

“Pemantauan itu monitoring evaluasi ya. Setiap tahun itu ada pasti ya. Untuk lebih rincinya gimana bisa ditanyakan ke kepala seksi atau kepala bidang saja ya yang lebih paham. Soalnya disini saya sebagai tenaga kontrak jadi kurang memahami betul kalau soal monev. Paham sih tapi ga mendalam gitu lho takut salah ngasih info haha. Setau saya sih ada monev dari propinsi dan pusat tiap tahun. Biasanya yang saya tau kita dikasih kuesioner gitu suruh ngisi tapi ya yang ngisi Ibu Tri yang lebih berwenang.” (Wawancara tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Kuswati selaku Pekerja

Sosial Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Beliau mengaku tidak

terlalu paham tentang pemantauan. Namun menurut beliau Dinas Sosial PPKB PPPA pernah menyelenggarakan rapat untuk evaluasi P2TP2A Semanah. Selain itu beliau yakin pemerintah pusat dan daerah ikut mengawasi jalannya P2TP2A Semanah karena program P2TP2A merupakan program dari pemerintah pusat.

“Setau saya mereka pernah ada kayak rapat gitu mbak, tapi kembali lagi saya kan bukan pegawai tetap jadi ya saya kurang tau hehe. Tapi ya namanya pmda pasti diawasi kan mbak kerjanya sama pusat. Pasti ada lah pemantauan. Kan kita melaksanakan P2TP2A juga berdasarkan peraturan yang keluar dari pusat mbak bukan inisiatif dinsos sendiri. Waktu itu juga pernah kalau ga salah ada kunjungan langsung dari provinsi apa ya, kayak sidak gitu.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2018 pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan penggalan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan P2TP2A dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan pemantauan yang dilakukan oleh internal organisasi sendiri maupun pemantauan yang dilakukan oleh eksternal organisasi. Pemantauan dari internal organisasi berupa rapat evaluasi dan monitoring yang diadakan secara berkala untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi kendala selama ini. Laporan pengimplementasian P2TP2A juga disampaikan ke Bupati sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Dinas Sosial PPKB PPPA ke pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Pemantauan dari eksternal berupa pemantauan langsung dari pemerintah pusat maupun provinsi setiap tahun berupa isian daftar kuesioner terkait P2TP2A atau inspeksi mendadak untuk meninjau langsung kondisi pengimplementasian P2TP2A Semanah di Kabupaten Magelang. Selain itu Dinas Sosial PPKB PPPA juga terbuka terhadap instansi maupun lembaga manapun baik itu lembaga jejaring maupun lembaga independen lain yang ingin melakukan pemantauan program.

Masyarakat Kabupaten Magelang juga memiliki perspektif yang sama dengan pegawai Dinas Sosial PPKB PPPA terkait pemantauan program. Bapak Priyono, warga Kecamatan Mertoyudan menilai, pemantauan program dilakukan oleh seluruh aspek, dari pemerintah pusat hingga masyarakat daerah setempat.

“Yo ada to mbak. Lha ini P2TP2A kan istilahnya bentuk perhatian pemerintah buat ngatasi korban kekerasan, sementara kalo pusat kerja sendirian ya gak bakalan bisa wong Indonesia luas banget makanya diserahkan ke daerah sampe ke kecamatan-kecamatan gini. Nah yo program ini pasti juga diawasi sama pusat to mbak kan sebenarnya mereka yang nyuruh daerah. Trus juga pasti ada kan LSM yang memantau jalannya program ini wong korupsi aja banyak kan mbak LSM yang mantau. Gausah jauh-jauh sih mbak, saya lho sebagai wong biasa yang kebetulan sebagian jatah ngurus PPT disini gini juga boleh mantau kan ngasih tau kendala yang terjadi di kecamatan gini apa aja. Terus juga orang-orang Dinsos sering datang mantau juga gimana jalannya program ini di kecamatan sini.” (Wawancara tanggal 28 April 2018 pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut pernyataan mengenai pemantauan program juga disampaikan oleh Ibu Sri Dwi, warga Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

“Pemantauan? Waduh saya kurang tau mbak. Tapi pasti yo ada to mbak yang ngawasin. Kalo dari masyarakat mungkin ada mbak tapi saya sendiri gak paham ah mbak hahaha. Ya semoga program ini bisa sampai ke semuanya termasuk yang pelosok atau ndeso seperti saya begini yang gak tau apa-apa. Ada program bagus begini kan sayang mbak kalo gak banyak yang tau kayak saya.” (Wawancara tanggal 12 Mei 2018 pukul 11.00 WIB)

Ibu X, salah satu korban KDRT yang berhasil peneliti wawancarai, ikut menambahkan pendapatnya mengenai pemantauan.

“Hmm ada kayaknya ya haha. Program dinas begini pasti ada yang mantau. Orang-orang juga bisa menurut saya ikutan mantau ngasih saran ya walaupun mungkin sekedarnya saja gak bisa yang wow

hahaha. Ini juga saya selalu dikontrol sama pihak dinsos terkait kasus saya, itu pemantauan juga kan ya mbak namanya.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara dengan masyarakat diatas dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat memahami bahwa mereka dapat melakukan pemantauan terhadap P2TP2A dengan melapor ke pihak-pihak terkait yang dapat berupa saran, masukan maupun pemaparan kendala yang terjadi. Peran masyarakat dalam proses pemantauan sangatlah penting karena masyarakat adalah subjek yang berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai fakta yang terjadi meskipun berupa kendala-kendala demi terimplementasinya P2TP2A Semanah sesuai dengan tujuan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program P2TP2A

Suatu program apabila telah diimplementasikan tidak akan bisa terlepas dari hal-hal yang mendukung program tersebut. Begitu pula sebaliknya, hal-hal yang menghambat juga tidak dapat dipungkiri akan selalu muncul. Hal-hal tersebut kenyataannya memang diperlukan untuk membuat suatu program dapat menjadi lebih baik atau dapat dicari solusinya.

a. Faktor Pendukung

1. Dukungan Pemerintah

Hal yang mendukung P2TP2A selama ini adalah adanya dukungan dari berbagai macam pihak termasuk dukungan pemerintah. Dalam hal ini,

P2TP2A juga mendapatkan dukungan yaitu pemberian bantuan oleh pemerintah terkait sarana dan prasarana.

“O ya jelas bantuan dari pemerintah terkait sarana dan prasarana yang bisa mendukung P2TP2A ini. Yang pertama ada sekretariat P2TP2A. Itu letaknya terpisah dari gedung ini tapi masih satu lingkup. Letaknya memang masih kurang strategis sih dibelakang gitu tapi ya setidaknya kita sudah punya. Jadi gak bingung kalo misal ada pengadu atau korban dateng langsung mau ditempatkan dimana.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)



Gambar 9. Sekretariat P2TP2A

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan penggalan wawancara diatas, Ibu Retno Indriastuti selaku Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA juga menambahkan adanya Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak juga menunjang program P2TP2A.

“Selain itu kita punya MOLIN. Ini bantuan dari pusat. Molin itu singkatan dari Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak. Molin benar-benar membantu ketika ada korban yang tidak bisa datang ke kantor atau korban yang butuh di evakuasi. Di dalam Molin juga udah lengkap dalemnya ada P3K ada tandu juga.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)



Gambar 10. Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Tri Setyowati, S.H. selaku Plt. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang menaungi P2TP2A.

“Iya kita punya sekretariat dibelakang, punya MOLIN juga itu di halaman depan bantuan pusat kalo tadi mbak merhatiin. Dua itu sarpras yang jadi penunjang selama ini.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB)

Senada dengan Ibu Tri, Bapak Anang selaku Kepala Bidang PPPA juga menyebutkan MOLIN dan ruang sekretariat P2TP2A merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang jalannya program selama ini.

“Sarpras bantuan mbak. MOLIN sama ruang sekretariat dibelakang itu kita dikasih. Tadinya kita gak punya lahan.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB)

2. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat dianggap berpengaruh terhadap efektivitas program P2TP2A. Masyarakat Kabupaten Magelang kini mulai memiliki pola pikir yang lebih terbuka sehingga mendukung program ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu Nur Azizah, S.H. selaku fulltimer P2TP2A.

“Masyarakat sekarang makin banyak yang terbuka mbak. Kalo dulu kan hal-hal kayak perkosaan, kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual pokoknya yang berbau seks gitu-gitu pasti dianggap tabu ya, jadi gak ada yang mau atau gak ada yang berani speak up ngebahas. Malah cenderung ditutup-tutupin dianggap aib. Kan bahaya kalo pola pikirnya masih seperti itu semua. Darimana kita bisa tau kalo ternyata ada tindak kekerasan kalo mereka nutupin kan? Nah bagusnya belakangan ini udah lebih terbuka, masyarakat mulai banyak yang ngelaporin gak diem aja kalo tau ada kekerasan.” (Wawancara tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)

Senada dengan pernyataan diatas, Ibu Tri Setyowati selaku Plt. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak juga menganggap lebih terbukanya pola pikirnya masyarakat saat ini sangat membantu P2TP2A.

“Selain itu mbak, pemikiran warga kita sekarang udah mau diajak maju gak primitif kayak dulu. Maksud saya primitif itu ya kalo udah ngomongin yang namanya kekerasan seks pasti dianggap tabu. Kalo tau ada kekerasan rumah tangga malah didiemin dianggap aib jadi ngerasa takut kalau mau melaporkan. Padahal korban itu pasti butuh bantuan, pasti ada korban yang gak berani ngelapor kan, nah disitu masyarakat sekarang lebih berperan aktif. Lebih peka dengan lingkungan sekitarnya juga alhamdulillah ya seneng saya.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB).

b. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai inti karena manusia dapat menjadi penggerak atau pengolah sumber daya yang lain. Namun sayangnya, sumber daya manusia di Dinas Sosial PPKB PPPA dianggap menjadi salah satu faktor penghambat P2TP2A. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Anang Kusbandianto selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang berikut.

“Penghambat ya hmm, SDM-nya mbak. Saya akui SDM kita masih kurang dari segi jumlah. Kita bicara riilnya saja ya mbak, di bidang saya ini membawahi 3 seksi. Kepala seksi perlindungan perempuan dan anak sampai sekarang masih kosong karena sebelumnya pensiun. Kita ngajuin minta orang tapi gak segampang itu sekarang prosesnya jadilah ini jalan 2 tahun kosong. Akhirnya ditunjuklah itu Ibu Tri kepala seksi pemenuhan hak anak menjadi plt seksi ppa. Kasian saya sama bu Tri tapi ya mau gimana lagi memang kita nyatanya kekurangan. Terus tiap seksi itu kita punya 1 staf. Ini juga sebenarnya masih kurang karena idealnya paling engga punya 2 staf. Apalagi untuk seksi ppa kita kan ada P2TP2A yang mana kegiatannya padat, hampir tiap hari ada laporan kasus. Belum lagi ngurus kasus-kasus yang lama. Ya bayangkan saja mbak sepadat itu cuma dijalankan oleh 2 orang, kasie sama staf.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB)

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Nur Azizah selaku fulltimer P2TP2A Semanah.

“Jumlah pegawai mbak. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ini udah agak lama kosong mbak, jadilah kepala seksi pemenuhan hak anak yang jadi pelaksana tugas. Kebayang kan repotnya. Double job dan yang jadi plt juga mau gak mau harus sambil belajar karena belum pengalaman. Saya ini kan staf seksi PPA walaupun saya tenaga kontrak. Disini saya juga berperan sebagai fulltimer P2TP2A ya karena siapa lagi yang bisa full ngurusin program ini. Padahal saya juga mobilisasi terus kerjanya gak cuma duduk di kantor. Kalo ada laporan masuk, saya cek-cek, gak jarang yang membuat saya harus keluar. Satu kasus juga gak mungkin bisa langsung kelar kan, saya juga masih harus ngurus kasus lama. Ada yang saya harus nemenin ke pengadilan, ke polisi, atau ke rumah sakit jiwa. Banyak kan mbak kegiatannya makanya sebenarnya idealnya sih dalam satu seksi ada 2 staf mbak biar bisa lebih efektif dan efisien. Ada sebenarnya peksos tapi ya namanya pekerja sosial kan tetep gak bisa maksimal dilihat dari segi waktu sama tenaganya. Gak mungkin kita maksa dia. (Wawancara tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)

Pengakuan yang sama datang dari Ibu Tri Setyowati selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPKB PPPA.

“Ada mbak, ini saya kan kepala seksi pemenuhan hak anak tapi gara-gara seksi ppa gak ada orang ya kebetulan saya yang diamanahi jadi pelaksana tugas. Padahal saya ini belum lama dimutasi dari Dinas yang sebelumnya gak ada hubungannya sama sekali. Saya masih harus belajar soal pemenuhan hak anak juga harus belajar ppa. Belajar doang juga gak bakal selesai, harus ngehandle kerjaan juga. Jadi kerja ya sambil saya pelajari 2 bidang itu. Pelan-pelan lah pusing juga saya gak mungkin bisa langsung semua kan. Sebenarnya saya pikir awalnya ada pelatihan atau diklat gitu mbak tapi ternyata gak ada sama sekali. Saya sempet diskusi sama Kabid saya eh ternyata beliau juga dari mutasi jadi masih sama-sama belajar. Ya saya cuma bisa otodidak sama learning by doing aja sama nanya-nanya ke orang yang sebelumnya di bagian saya sekarang.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB)

Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Ibu Retno Indriastuti menambahkan terkait kurangnya SDM yang dianggap dapat menghambat P2TP2A.

“Gini mbak, SDM kita sebenarnya berkualitas karena PNS kan masuk melalui seleksi rekrutmen. Nah tapi karena kemarin banyak yang kena mutasi jadilah ini mereka harus belajar lagi. Misal dari yang awalnya Kepala Seksi Angkutan Umum Dishub eh sekarang di Dinsos PPKB PPPA harus jadi Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak. Kan beda banget. Sayangnya kita belum ada semacam pelatihan singkat gitu. Jadi yang sering terjadi justru staf yang lebih paham bidangnya karena mereka sudah lama nangani. Dari sisi jumlah juga kita masih kekurangan. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang menaungi P2TP2A ini saja diisi oleh Plt. Apalagi P2TP2A, kita butuh tim tersendiri yang fokus menangani.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)

Pekerja Sosial Dinas Sosial PPKB PPPA, Ibu Kuswati, turut memaparkan pendapatnya mengenai apa yang menjadi penghambat P2TP2A selama ini.

“Tenaga pegawai sih ya yang masih kurang. Ya kita nangani korban kan gak sedikit yang butuh konseling. Kita belum punya psikolog sendiri yang nangani itu. Trus kita melakukan pendampingan hukum juga, tapi juga belum punya konsultan hukum atau pengacara khusus. Jadinya ya kita bermitra sama

mereka sulitnya kalau kita butuh mereka gak bisa secepat kalo kita udah punya sendiri.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2018 pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan penggalan-penggalan wawancara dengan beberapa narasumber diatas, salah satu faktor yang selama ini dianggap menghambat P2TP2A adalah Sumber Daya Manusia. Selama ini SDM yang ada di Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang masih dianggap kurang. Hal tersebut terlihat dari jumlah staf yang belum ideal dan masih ditemukan posisi yang kosong padahal posisi tersebut cukup krusial. Posisi tersebut sementara ini diisi oleh pelaksana tugas yang mana memiliki jabatan yang setara di seksi lain. Selain dari segi jumlah yang masih kurang, kualitas SDM juga masih belum cukup mumpuni akibat mutasi pegawai. Keberadaan tenaga ahli seperti psikolog dan konsultan hukum atau pengacara juga dianggap perlu untuk menunjang penanganan korban agar lebih efektif.

2. Sarana dan Prasarana

Selain SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial PPKB PPPA juga dianggap masih banyak kekurangan meskipun mereka sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang menunjang. Hal ini dikemukakan langsung oleh Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, Ibu Retno Indriastuti.

“Sebenarnya sarpras kita juga masih banyak kurangnya sih mbak. ya walaupun kita sudah punya sekretariat dan MOLIN yang sangat membantu tapi kita juga masih kurang banyak. Selain dua itu kita harusnya punya rumah aman mbak. Jadi kita gak perlu bingung lagi mau naruh dimana apabila ada korban yang butuh tempat aman secepatnya. Selama ini kan kalo ada korban yang membutuhkan rumah aman ya kita cuma bisa nitip ke panti asuhan. Makanya kita

kerjasama sama mereka. Sama kayak kita kerjasama dengan RSJ karena kita sudah pasti butuh psikolog tapi masih belum punya. Jadilah kita sejauh ini bermitra dengan mereka semua yang belum ada di P2TP2A.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)

Disamping mengakui masih kurangnya sarana dan prasarana P2TP2A yang dimiliki, Ibu Retno menambahkan informasi bahwa salah satu langkah untuk memperbaiki sarana dan prasarana adalah dengan menjadikan P2TP2A sebagai Unit Pelayanan Terpadu atau UPT.

“Kita sebenarnya sedang fokus mempersiapkan P2TP2A ini untuk menjadi UPT. Kita sudah siapkan gedung baru khusus UPT P2TP2A ini. Rencananya kita akan perbaiki kekurangan-kekurangan seperti rumah aman yang belum dipunya. Jadi biar bisa lebih efektif dan efisien lah ya, diharapkan bisa lebih maksimal penanganannya. Pembentukan UPT ini nantinya ada struktur P2TP2A tersendiri, idealnya memang begitu, di beberapa kota lain sudah seperti itu. Selama ini sebenarnya P2TP2A sudah punya struktur tapi masih belum berjalan ya gimana orangnya kan kurang.” (Wawancara tanggal 27 April 2018 pukul 09.20 WIB)

Sarana dan prasarana juga dirasakan sebagai salah satu penghambat menurut pemaparan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Anang Kusbandianto.

“Ketersediaan fasilitas. Ya itu yang menghambat. Standarnya di beberapa wilayah, P2TP2A harusnya memiliki rumah aman. Selama ini kan kita mengandalkan panti asuhan saja yang sebenarnya agak ribet setiap kita butuh cepat.” (Wawancara tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB)

Pelaksana tugas Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Tri Setyowati menegaskan bahwa sarana prasarana yang dimiliki juga masih memiliki sejumlah kekurangan.

“Rumah aman sih yang paling kita butuhkan sekarang tapi masih belum punya. Sekretariat juga dirasa kurang bisa mencakup kebutuhan sih mbak, perlu perluasan. Tapi P2TP2A bakal segera

dijadikan UPT mbak jadi lebih memadai insyaAllah sarprasnya.”
(Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 10.05 WIB)

Senada dengan penggalan wawancara diatas, Ibu Nur Azizah selaku fulltimer P2TP2A ikut menambahkan penjelasan terkait hal-hal yang menghambat.

“Selain itu apa ya, kalo misal dibandingin sama P2TP2A di daerah lain masih banyak pasti kurangnya di sarpras terutama. Keterbatasan tempat ya, kita udah punya sekretariat tapi masih belum maksimal lha wong kecil begitu. Terus juga masih ribet nitip korban ke panti karena kita belum punya rumah aman.”
(Wawancara tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.20 WIB)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Pekerja Sosial Dinas Sosial PPKB PPPA yang sering membantu menangani korban di P2TP2A Semanah, Ibu Kuswati.

“Itu mbak sekretariat saya rasa udah perlu untuk perluasan ya, saya dengar memang sebentar lagi akan diubah jadi UPT gitu terus pindah di bangunan terpisah dari Dinas Sosial PPKB PPPA.”
(Wawancara tanggal 10 Mei 2018 pukul 13.30 WIB)

Dari penggalan-penggalan wawancara diatas dapat diinterpretasikan bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti belum tersedianya rumah aman untuk para korban dan sekretariat P2TP2A yang masih belum memadai dapat menghambat P2TP2A.

H. Analisis Data

1. Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

a. Ketepatan Sasaran Program

Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang memiliki program untuk melayani masyarakat dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A dalam pelaksanaannya memiliki sasaran yang ingin dicapai, yakni siapa-siapa saja yang akan dikenai oleh program ini dan sudah sejauh mana target Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dapat tercapai. Sasaran program adalah objek kebijakan yang dituju dengan dilaksanakannya suatu program melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Sasaran dalam P2TP2A adalah perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Magelang. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 14 ayat 2 yaitu “P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.” Sesuai dengan hasil penelitian bahwa program selama ini dianggap sudah tepat sasaran. Hal ini dilihat dari banyaknya laporan-laporan korban kekerasan yang masuk adalah perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan data rekapitulasi laporan kasus kekerasan perempuan dan anak P2TP2A yang didapat dari Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dimana pada tahun 2016 laporan terhadap kekerasan anak berjumlah 61 kasus dan kekerasan pada perempuan sebanyak 52 kasus. Sedangkan di tahun 2017 laporan kasus kekerasan

anak yang masuk berjumlah 46 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 70 kasus. Namun tidak menutup kemungkinan P2TP2A Semanah menerima aduan yang memposisikan laki-laki sebagai korban meskipun jumlahnya sangat kecil. Sedikitnya laporan masuk yang menyatakan bahwa laki-laki menjadi korban kekerasan juga semakin memperkuat ketepatan sasaran program ini. Hal ini diketahui berdasarkan data rekapitulasi tercantum yang menunjukkan dari tahun 2013 hingga 2017 hanya terdapat 1 laporan kasus yang masuk mengenai kekerasan terhadap laki-laki. Sasaran program P2TP2A ini memang lebih berfokus pada perempuan dan anak, karena kondisi psikis perempuan dan anak lebih rentan, sehingga sering menjadi objek kekerasan, maka dari itu perempuan dan anak lah yang perlu dilindungi.

Penjelasan diatas sudah sejalan dengan pendapat Budiani (2007:53), bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program adalah dengan menggunakan salah satu indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran program; sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. P2TP2A Semanah sejauh ini sudah tepat sasaran.

b. Sosialisasi Program

Salah satu cara agar suatu program dapat tercapai tujuannya adalah dengan melakukan sosialisasi. Penyebaran informasi sangat penting dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat termasuk sasaran program dapat mengenal dan mengetahui eksistensi dari program tersebut. Bagaimana mungkin masyarakat dapat memanfaatkan sebuah program yang tersedia untuk mereka apabila tidak

mengetahui eksistensi program tersebut. P2TP2A Semanah telah melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi agar tujuannya dapat tercapai. Sosialisasi yang ditempuh melalui dua cara, yakni sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi langsung dilakukan di tiap-tiap kecamatan dengan mengumpulkan warga di balai warga. Warga dapat membantu melaporkan kasus kekerasan melalui telepon, sms, *whatsapp* atau mendatangi kantor Dinas Sosial PPKB PPPA langsung. Mereka juga dapat melaporkan pada PPT kecamatan, kelurahan maupun desa. Sedangkan bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung yang telah ditempuh yaitu dengan menyebarkan pamflet dan poster, memasang banner di titik-titik yang dianggap strategis. Selain itu P2TP2A juga melakukan sosialisasi melalui siaran radio bekerja sama dengan stasiun radio Gemilang FM.

Namun sosialisasi program ini masih dapat dikatakan belum efektif meskipun berbagai macam sosialisasi telah ditempuh. Masih ditemukannya masyarakat yang mengaku tidak mengetahui P2TP2A menjadi bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini belum efektif. Masyarakat sebatas hanya mengetahui harus melapor apabila mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disekitarnya namun masih belum mengetahui apabila ada program yang khusus menangani hal tersebut.

Sosialisasi yang ditempuh selama ini oleh Dinas Sosial PPKB PPPA untuk P2TP2A Semanah masih bersifat konvensional. Sosialisasi langsung di balai warga misalnya, tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena terkendala waktu dan tempat dengan berbagai latar belakang profesi yang dilakoni masyarakat. Hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan pemanfaatan media

sosial. Media sosial di era modern ini dapat memberikan kemudahan dan aksesibilitas apabila dikelola secara maksimal. P2TP2A belum memiliki *website* atau semacam aplikasi perangkat pintar yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi atau pelaporan terkait program yang menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Iklan layanan masyarakat juga sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan bekerja sama dengan stasiun televisi daerah, videotron maupun media cetak seperti koran atau majalah.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum efektif jika mengacu pada teori Budiani (2007:53) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan Program

Tujuan program P2TP2A ini adalah seperti yang terlampir pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 3 yang mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan dibentuknya program ini yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dan melindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, di antara lain:

1. Mencegah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;

2. Menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
3. Melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam mendapatkan hak-haknya yang sah secara konstitusi
4. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi, pelapor, dan saksi; dan
5. Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan data dari hasil wawancara di penyajian data sebelumnya sudah dijelaskan dari beberapa narasumber yang mengetahui seluk beluk program P2TP2A mengenai tujuan dari program ini. Secara garis besar dari penyampaian narasumber, tujuan yang dilakukan telah sesuai dan sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan didalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 3 yaitu bahwa program P2TP2A ini memang bertujuan untuk melakukan perlindungan hak-hak dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cara yang dilakukan Dinas Sosial di Kabupaten Magelang adalah dengan memfasilitasi kebutuhan dan memberikan pelayanan serta perlindungan bagi korban-korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak.

Hal ini juga selaras dengan ciri-ciri dari terlaksananya suatu program yang baik yang dikemukakan oleh *United Nation* dalam Zauhar (1993:2) yaitu dengan adanya perumusan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dalam suatu

program menandakan bahwa nantinya suatu program yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir akan berlangsung dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. Maka dari itu, pelaksanaan dari program P2TP2A ini sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik karena sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal dan telah tercantum pula pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016.

d. Pemantauan Program

Indikator kesuksesan suatu program tidak hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu program tersebut dalam pelaksanaannya. Pemantauan atau pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui kendala atau permasalahan apa saja yang terjadi agar dapat diminimalisir dengan melakukan perbaikan dan perencanaan yang lebih matang kedepannya agar program tersebut lebih efektif.

Pemantauan P2TP2A dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan pemantauan yang dilakukan oleh internal organisasi maupun pemantauan yang dilakukan oleh eksternal organisasi. Pemantauan dari internal organisasi berupa rapat evaluasi dan monitoring dari Dinas Sosial PPKB PPPA sendiri yang diadakan secara berkala yakni 4 kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi kendala selama ini. Selain itu apabila sedang dalam keadaan darurat, tim P2TP2A sewaktu-waktu diperbolehkan untuk mengadakan rapat sesuai kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi dari segi eksternal organisasi, pemantauan langsung dari pemerintah pusat maupun provinsi secara berkala berupa isian daftar kuesioner terkait P2TP2A, pelaporan setiap tahun atau bahkan inspeksi

mendadak untuk meninjau langsung kondisi pengimplementasian P2TP2A di Kabupaten Magelang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2015 pasal 21 yang berbunyi “Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.” Sedangkan terkait dengan evaluasi dijelaskan dalam pasal 22 yaitu “Evaluasi penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1 (satu) kali dalam setahun.”

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga ikut mengawasi P2TP2A ini. Hal ini terbukti dengan laporan mengenai penyelenggaraan P2TP2A yang disampaikan ke Bupati setiap akhir tahun sebagai salah satu bentuk tanggungjawab Dinas Sosial PPKB PPPA. Hal ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu Dinas Sosial PPKB PPPA juga terbuka terhadap instansi maupun lembaga manapun baik itu lembaga jejaring maupun lembaga independen lain seperti LSM yang ingin melakukan pemantauan program. Masyarakat juga

diperbolehkan ikut mengawasi penyelenggaraan P2TP2A sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 22 yang berbunyi “Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.” Dari hasil wawancara dengan masyarakat, mereka juga sudah memahami bahwa mereka dapat melakukan pemantauan terhadap P2TP2A dengan melapor ke pihak-pihak terkait yang dapat berupa saran, masukan maupun pemaparan kendala yang terjadi. Peran masyarakat dalam proses pemantauan sangatlah penting karena masyarakat adalah subjek yang berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai fakta yang terjadi meskipun berupa kendala-kendala demi terwujudnya P2TP2A Semanah yang efektif.

Berdasarkan analisis diatas, pemantauan program P2TP2A yang dilakukan sudah sesuai dengan teori dari Budiani (2007:53) bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilihat dengan menggunakan indikator pemantauan program. Suatu program dikatakan efektif jika organisasi senantiasa melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program yang sedang berjalan guna memastikan pencapaian tujuan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program P2TP2A

a. Faktor Pendukung

1. Dukungan Pemerintah

Suatu program tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak termasuk pemerintah. Tanpa adanya dukungan, mustahil suatu program bisa berjalan tanpa hambatan. Dalam hal ini, P2TP2A juga mendapatkan dukungan yaitu pemberian bantuan oleh pemerintah. Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut MOLIN. Dari hasil wawancara, diketahui MOLIN ini sangat membantu kegiatan P2TP2A yang selama ini membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi dengan cakupan wilayah Kabupaten Magelang yang luas. MOLIN ini juga dilengkapi dengan perlengkapan kesehatan layaknya ambulans seperti tandu dan P3K sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak.

Selain MOLIN, P2TP2A juga telah memiliki sekretariat yang terpisah dengan gedung Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Meskipun terpisah, letak sekretariat ini tidak begitu jauh dari gedung utama. Sekretariat ini merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Magelang karena pada awalnya Dinas Sosial PPKB PPPA tidak cukup memiliki lahan untuk membangun sekretariat. Sejauh ini sekretariat juga telah banyak membantu sebagai ruang tamu/konsultasi apabila ada korban kekerasan perempuan dan anak maupun masyarakat yang datang melapor langsung ke Dinas Sosial PPKB PPPA. Berkas dan dokumen mengenai P2TP2A juga menjadi lebih terpusat dan terorganisir di sekretariat.

2. Pola Pikir Masyarakat

Setiap individu diciptakan dengan berbagai macam pola pikir yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Pola pikir masyarakat juga dianggap berpengaruh terhadap efektivitas program P2TP2A. Apabila masyarakat Kabupaten Magelang masih memiliki pola pikir yang tertutup seperti menganggap kasus perkosaan, pelecehan maupun kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah sesuatu yang tabu dibicarakan atau bahkan dianggap aib, maka P2TP2A tidak akan bisa berjalan seperti sekarang karena masyarakat maupun korban sendiri tidak ada yang berani yang melapor. P2TP2A tidak akan pernah mengetahui kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Magelang apabila masyarakat tidak berpikiran lebih terbuka seperti sekarang.

b. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Selama ini SDM yang ada di Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang masih dianggap kurang. Hal tersebut terlihat dari jumlah staf yang belum mencapai angka ideal. Terlebih masih ditemukannya posisi atau jabatan kosong yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan P2TP2A yaitu Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak. Posisi tersebut sementara ini diisi oleh pelaksana tugas yang mana memiliki jabatan yang setara di seksi lain.

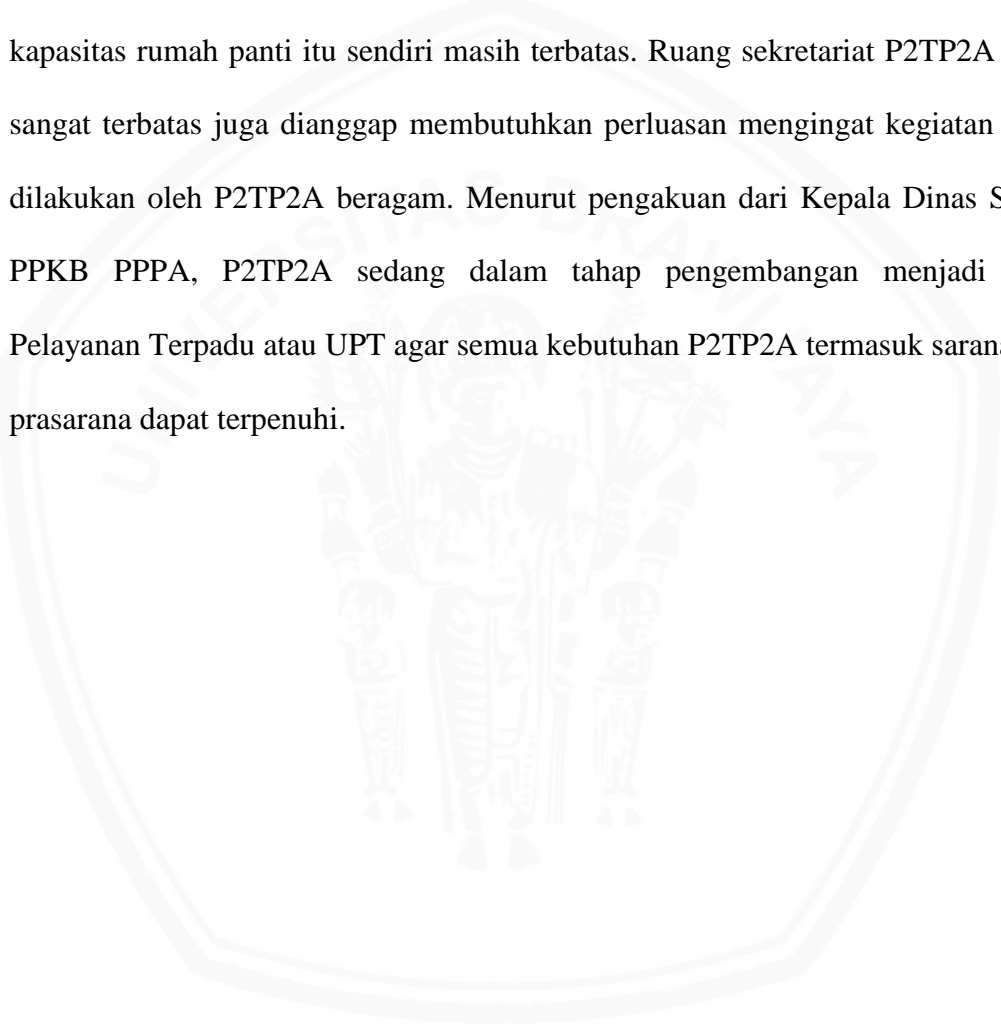
Selain dari segi jumlah yang masih kurang, kualitas SDM juga masih belum cukup mumpuni akibat mutasi pegawai. Mutasi pegawai yang cukup banyak mengakibatkan pegawai harus beradaptasi dari awal, mempelajari bidang barunya masing-masing. Adaptasi yang dilakukan harus mandiri karena tidak ada pengenalan atau pelatihan singkat mengenai bidang masing-masing. Hal ini justru rawan menimbulkan benturan antara atasan baru yang kurang menguasai dengan staf yang lebih memahami bidangnya.

Keberadaan tenaga ahli seperti psikolog dan konsultan hukum atau pengacara juga dianggap perlu untuk menunjang penanganan korban agar lebih efektif. Selama ini P2TP2A masih harus membawa korban ke rumah sakit jiwa dahulu apabila korban membutuhkan penanganan psikolog atau mengunjungi kantor konsultan hukum apabila korban membutuhkan bantuan hukum.

2. Sarana dan Prasarana

Suatu program membutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat atau penunjang utama agar program tersebut dapat tercapai tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial PPKB PPPA dianggap masih belum cukup memadai meskipun mereka sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang menunjang seperti sekretariat P2TP2A dan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) yang merupakan bantuan dari

pemerintah. Belum tersedianya rumah aman untuk para korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan tempat perlindungan sementara membuat tim P2TP2A harus menitipkan korban ke panti asuhan yang sudah memiliki kerjasama dengan P2TP2A. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakefektifan karena jarak rumah panti asuhan yang tidak cukup dekat serta kapasitas rumah panti itu sendiri masih terbatas. Ruang sekretariat P2TP2A yang sangat terbatas juga dianggap membutuhkan perluasan mengingat kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A beragam. Menurut pengakuan dari Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, P2TP2A sedang dalam tahap pengembangan menjadi Unit Pelayanan Terpadu atau UPT agar semua kebutuhan P2TP2A termasuk sarana dan prasarana dapat terpenuhi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dapat dikatakan sudah cukup efektif. Hal ini ditentukan berdasarkan indikator-indikator efektivitas program diantaranya:

1. Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- a. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program dari P2TP2A dinilai sudah tepat sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 14 yaitu perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Magelang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa laporan-laporan kasus yang masuk selama ini berasal dari perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Magelang.

b. Sosialisasi Program

Berbeda dengan indikator selanjutnya yakni sosialisasi program. Sosialisasi program yang dilakukan oleh P2TP2A dapat dikatakan masih belum efektif berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih ditemukannya masyarakat dan sasaran program yang belum mengetahui P2TP2A. Sosialisasi yang telah dilakukan selama ini oleh P2TP2A adalah sosialisasi langsung ke tiap-tiap kecamatan, melakukan siaran radio, memasang baliho di beberapa tempat dan menyebarkan pamflet serta poster.

c. Tujuan Program

Pemaparan tujuan program P2TP2A berdasarkan hasil penelitian secara garis besar juga telah sesuai dan sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 3 yaitu bahwa program P2TP2A ini memang bertujuan untuk melakukan perlindungan hak-hak dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang adalah dengan memfasilitasi kebutuhan dan memberikan pelayanan serta perlindungan bagi korban-korban kekerasan baik perempuan maupun anak.

d. Pemantauan Program

Indikator efektivitas program selanjutnya yaitu dari segi pemantauan program dinilai sudah tepat berdasarkan pemantauan program P2TP2A Kabupaten Magelang yang selama ini sudah berjalan. Pemantauan dan evaluasi P2TP2A dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah secara berkala. Selain itu masyarakat dan lembaga independen juga dapat

melakukan pemantauan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pemantauan dan evaluasi P2TP2A yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 pasal 21 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 21. Suatu program dikatakan efektif jika organisasi senantiasa melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program yang sedang berjalan guna memastikan pencapaian tujuan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan suatu program juga tidak dapat terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung P2TP2A adalah dukungan dari pemerintah berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan ruang sekretariat P2TP2A. Selain itu pola pikir masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih terbuka mengenai kasus kekerasan perempuan dan anak juga memberikan pengaruh pada program P2TP2A ini.

b. Faktor Penghambat

Sebaliknya dari segi faktor penghambat, sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang kurang jumlah dan kualitasnya dianggap masih belum cukup mumpuni akibat dari mutasi pegawai. Keberadaan tenaga ahli seperti psikolog dan konsultan hukum untuk P2TP2A juga diperlukan namun masih belum tersedia. Faktor lain yang dianggap menghambat adalah sarana dan prasarana yang belum cukup memadai. P2TP2A seharusnya memiliki rumah aman untuk para korban kekerasan perempuan dan anak. Ruang sekretariat P2TP2A yang sangat terbatas juga dianggap membutuhkan perluasan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijabarkan berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi program yang dilakukan P2TP2A diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan pemanfaatan teknologi seperti website, aplikasi perangkat pintar maupun media sosial seperti *facebook* dan *twitter* agar lebih efektif. Penggunaan media sosial untuk program pemerintah sebenarnya bukanlah hal yang baru dan justru dapat menjangkau masyarakat lebih luas karena kemudahan akses yang ditawarkan. Dari segi biaya dan waktu pun juga dapat lebih efisien. Selain itu sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik seperti koran, majalah dan iklan layanan masyarakat yang dapat ditayangkan di stasiun televisi atau *videotron* juga diperlukan untuk menjangkau sasaran yang mungkin belum terlalu paham akan penggunaan teknologi.
2. Perlu adanya rekrutmen pegawai agar tidak terjadi kekurangan pegawai dan kekosongan jabatan. Pelatihan atau workshop juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Tenaga ahli seperti psikolog dan konsultan hukum atau pengacara khusus P2TP2A juga perlu ditambahkan mengingat pelayanan yang diberikan P2TP2A mencakup kesehatan jasmani dan rohani hingga pendampingan hukum.
3. Sarana prasarana perlu untuk dilengkapi, mengingat masih banyak yang belum ada seperti rumah aman yang seharusnya dimiliki P2TP2A. Ruang sekretariat pun juga dirasa kurang memadai maka dari itu diperlukan

perluasan. Dinas PPKB PPPA sedang mempersiapkan perubahan program P2TP2A menjadi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) P2TP2A dengan tujuan pelayanan yang lebih berfokus.

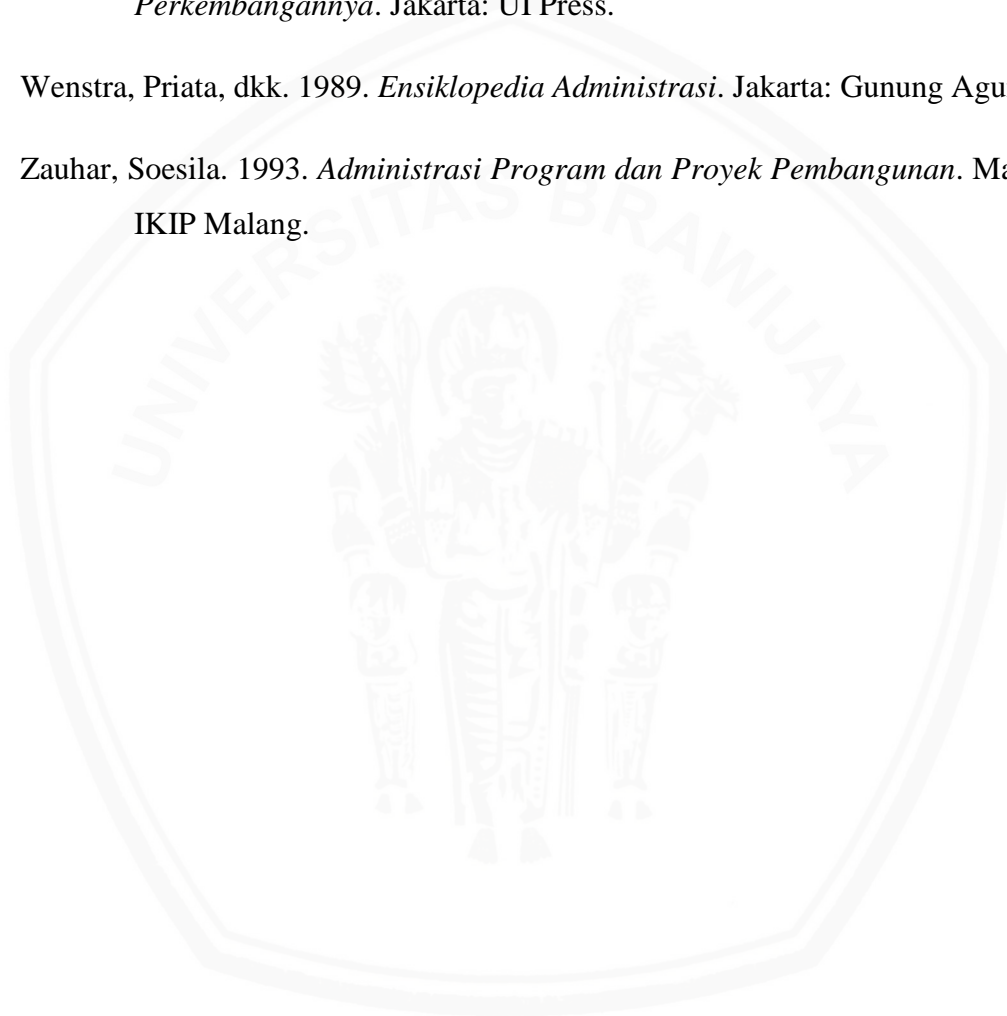


DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Anggita Putri. 2012. *Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta*. Depok: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Magelang dalam Angka*. Magelang: BPS Percetakan.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Semerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Vol.2 No.1.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.
- Kayatomo, Sutomo. 1985. *Program Pengembangan*. Bandung: Sinar Baru.
- Komnas Perempuan, dkk. 2017. *Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. SAGE Publication, Inc.
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nitisemito, Alex S. 1996. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rewansyah, Asmawi. 2011. *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Rizky Grafis.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto, 2005. *Metode Penelitian Sastra : Analisis Psikologis*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Diterbitkan untuk lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subhan, Zaitun. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit Lkis)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman dan Homzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwondo. 2001. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press.
- Wenstra, Priata, dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zauhar, Soesila. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.



Sumber lain:

Arsip P2TP2A Semanah Kabupaten Magelang

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 63 Tahun 2003

Keputusan Menteri PAN Nomor 58 Tahun 2002

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindakan Kekerasan dan
Diskriminasi

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Apa itu P2TP2A?
2. Apa tujuan dilaksanakannya P2TP2A ini?
3. Apa tugas dan fungsi dari P2TP2A?
4. Apa alasan atau yang latar belakang yang mendasari dibentuknya P2TP2A di Kabupaten Magelang ini?
5. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan P2TP2A?
6. Siapa yang menjadi sasaran program P2TP2A ini?
7. Bagaimana prosedur atau alur yang harus dijalankan apabila ada masyarakat atau korban yang melaporkan adanya tindak kekerasan?
8. Melalui media apa sajakah masyarakat dapat melaporkan adanya tindak kekerasan ke Dinas Sosial PPKB PPPA?
9. Mengenai sosialisasi, bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi yang telah dilakukan?
10. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi P2TP2A ini?
11. Seberapa sering (kuantitas) sosialisasi dilakukan kepada masyarakat?
12. Dimana saja Dinsos PPKB PPPA mensosialisasikan P2TP2A ini?
13. Mengenai pemantauan program, bagaimana bentuk pemantauan program P2TP2A yang sudah dijalankan selama ini?
14. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemantauan program tersebut?
15. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan P2TP2A?
16. Apa saja faktor yang mendukung program P2TP2A?
17. Apa saja faktor yang menghambat program P2TP2A?

Pedoman Wawancara kepada Masyarakat/Korban


1. Apakah Anda mengetahui P2TP2A?
2. Darimana Anda mengetahui P2TP2A?
3. Apakah Anda pernah mengikuti (atau melihat pamflet dan sejenisnya) sosialisasi P2TP2A atau tentang Kekerasan Perempuan dan Anak?
4. Dimana Anda pernah mengikuti atau melihat (sosialisasi)?
5. Menurut Anda, apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apa saja bentuknya?
6. Apakah yang Anda akan lakukan jika mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan Anda (keluarga, tetangga, dll) ?
7. Alasan Anda tentang tindakan yang dilakukan tsb?
8. Menurut Anda, apakah ada bentuk pengawasan atau usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak?
9. Apakah Anda pernah mengetahui adanya korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani oleh pemerintah (Dinsos PPKB PPPA) ?
10. Apa yang Anda harapkan kepada pemerintah dalam menanggulangi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian





Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Letnan Tukiayat No. 40 ☎ (0293) 788167 Kota Mungkid 56511

SURAT KETERANGAN
Nomor: *070 / 434 / 109 / 2018*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Indriastuti, SKM., M.Kes.
NIP : 19610407 198312 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang


Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Anisa Nurmalitasari
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 12 April 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 145030107111054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Adalah benar telah melakukan penelitian guna mendapatkan data sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul **"Efektivitas Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)"** Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, Mei 2018
KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG


RETNO INDRIASTUTI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
19640407 198312 2 001



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB
2. Sdr. Anisa Nurmalitasari

CURRICULUM VITAE

Nama : Anisa Nurmalitasari

Nomor Induk Mahasiswa : 145030107111054

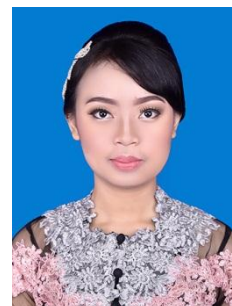
Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 12 April 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jalan Dewi Ratih no. 65 RT 4/ RW 2
Karanggading, Rejowinangun Selatan, Magelang
Selatan, Magelang, Jawa Tengah 56124

Email : anisanurmalitasari@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. 2000-2002 TK Taman Indria
2. 2002-2008 SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Magelang
3. 2008-2011 SMP Negeri 8 Magelang
4. 2011-2014 SMA Negeri 1 Magelang
5. 2014-2018 Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Publik

Pengalaman Organisasi

1. 2012 Redaksi Berita Smansa (SIBEMA) – Bendahara Umum II
2. 2014 BEM FIA UB – Staf Muda Kementerian Advokesma
3. 2015 Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) – Staf Madya Kementerian Dalam Negeri
4. 2016 Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) – Staf Divisi Pusminfo, Departemen Pelayanan Mahasiswa
5. 2016 Ikatan Mahasiswa Brawijaya Magelang (IKABRAMA) – Co-Founder dan Wakil Ketua Umum
6. 2017 Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) – Sekretaris II (Wakil Kepala Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan SKRT)